



# **CImplementasi COREMAP**

**Di Kabupaten Pangkajene:  
Partisipasi Masyarakat dan  
Manfaat Sosial Ekonomi**



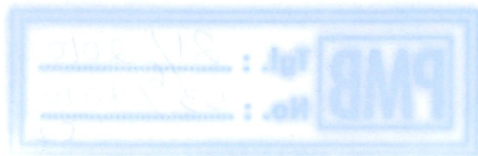
# **C**Implementasi **COREMAP**

**Di Kabupaten Pangkajene:  
Partisipasi Masyarakat dan  
Manfaat Sosial Ekonomi**



Oleh:

**MITA NOVERIA  
ASWATINI  
MEIRINA AYUMI MALAMASSAM**



COREMAP-LIPI

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(COREMAP II - LIPI)  
Jakarta, 2009**



**LIPI**

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP\*

Katalog dalam Terbitan

Implementasi COREMAP di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:  
Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi/Mita  
Noveria, Aswatini, Meirina Ayumi Malamassam – Jakarta: 2010.  
xvii + 94 hlm.; 14,8 x 21 cm

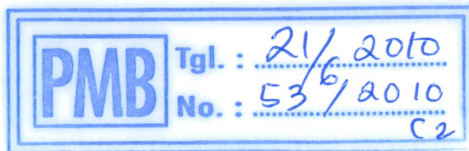
ISBN 978-602-8717-45-8

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911



\*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI  
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10  
Jakarta Selatan, 12710  
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720  
Telp.: (021) 5207205, 5221687  
*E-mail: ppk-lipi@rad.net.id*



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2008. Kajian sosial – ekonomi tahun 2006 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2008 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Timur. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, CRITC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

## RANGKUMAN

**K**egiatan Coremap yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 di Kabupaten Pangkep memiliki beragam tujuan. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kondisi dan pengelolaan terumbu karang secara fisik, akan tetapi juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di lokasi program. Target Coremap dari sisi ekonomi antara lain tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 2 persen per tahun atau 10 persen selama lima tahun pelaksanaan program. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kalangan masyarakat pesisir, yang menjadi salah satu tujuan Coremap. Selanjutnya, dari sisi sosial diharapkan adanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih mendukung bagi terpeliharanya kondisi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya.

Untuk mengetahui capaian Coremap diperlukan kajian dengan fokus pada isu-isu yang menjadi target yang hendak dicapai. Dari sisi ekonomi, pengukuran capaian kegiatan Coremap dilakukan dengan mengkaji (peningkatan) pendapatan masyarakat, tidak hanya yang berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Coremap, akan tetapi juga masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dari sisi sosial beberapa indikator yang sensitif untuk mengevaluasi capaian Coremap adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai sumber daya laut, khususnya terumbu karang serta perubahan perilaku dalam pengelolaan sumber daya laut tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji capaian Coremap, khususnya dari aspek sosial ekonomi. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2009 ini merupakan penelitian ketiga (T2), setelah penelitian pertama (T0) pada tahun 2006 dan yang kedua (T1) pada tahun 2008. Penelitian T0 bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat

sebelum kegiatan Coremap dilaksanakan, sedangkan penelitian T1 untuk mengetahui perubahannya setelah dua tahun kemudian. Penelitian T2 ini juga mempunyai tujuan yang sama, khususnya untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah sekitar empat tahun Coremap dilaksanakan. Melalui serangkaian penelitian dapat diketahui perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Coremap. Sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang juga terpilih menjadi responden pada penelitian T0 dan T1. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data juga sama dengan kedua penelitian tersebut, yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam, *focus group discussion* – FGD, dan observasi). Data yang dikumpulkan dianalisis secara analisis deskriptif, seperti yang juga dilakukan pada penelitian T0 dan T1.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara umum masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Pengetahuan tersebut kemudian dipraktekkan dalam perilaku yang tidak merusak sumber daya laut, misalnya menggunakan alat dan armada tangkap yang ramah lingkungan. Praktek ini dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat di kedua lokasi penelitian. Satu perubahan yang terlihat nyata setelah dilaksanakannya kegiatan Coremap adalah makin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk kelangsungan hidup terumbu karang. Upaya tersebut antara lain pencegahan berbagai aktifitas kenelayan terutama penangkapan ikan dan jenis-jenis biota laut lainnya menggunakan alat dan armada tangkap yang merusak sumber daya laut, yang pada umumnya dilakukan oleh nelayan dari luar daerah. Perubahan perilaku terjadi karena semakin baiknya pengetahuan masyarakat mengenai arti pentingnya terumbu karang, baik bagi ekosistem maupun untuk kehidupan sosial ekonomi



masyarakat. Peningkatan pengetahuan kemungkinan merupakan dampak positif dari kegiatan Coremap yang antara lain juga memberikan pengetahuan mengenai manfaat dan peran terumbu karang bagi kehidupan manusia.

Berbeda dengan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, pengetahuan masyarakat di kedua lokasi penelitian mengenai Coremap masih terbatas. Mayoritas penduduk memang mengetahui pelaksanaan kegiatan program Coremap di tempat tinggal mereka, akan tetapi tidak mengetahuinya secara mendalam, misalnya jenis-jenis kegiatan yang dilakukan serta mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Coremap juga terbatas. Pada umumnya mereka yang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah anggota masyarakat yang menjadi pengurus LPSTK (Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang) serta yang terlibat dalam pokmas (kelompok masyarakat) Coremap. Konsekuensinya, masyarakat yang merasakan manfaat dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Coremap juga sangat terbatas.

Terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Coremap kemungkinan karena kurang luasnya sosialisasi program tersebut. Kegiatan sosialisasi yang antara lain dilakukan melalui berbagai pertemuan di desa/kelurahan kebanyakan hanya melibatkan perwakilan masyarakat, misalnya pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat menyampaikan informasi yang diperoleh kepada masyarakat. Namun, kebanyakan peserta sosialisasi tidak melakukannya, sehingga informasi mengenai berbagai kegiatan Coremap tidak menjangkau masyarakat luas. Selain itu, luasnya desa/kelurahan lokasi Coremap, apalagi dengan kondisi geografis yang berupa kepulauan, menyebabkan pengelola program di tingkat desa/kelurahan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, pelaksanaan kegiatan

Coremap tampaknya juga berpotensi menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Hal ini dipicu oleh kecemburuan di antara mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan Coremap, khususnya kegiatan UEP yang memperoleh pinjaman dana bergulir berupa *seed fund*. Di Desa Mattiro Bombang, khususnya, ada kecenderungan terjadinya pengelompokan dalam masyarakat, yaitu kelompok yang memperoleh bantuan dana *seed fund* dan yang tidak memperolehnya, serta kelompok yang terlibat dalam kegiatan dan kepengurusan LPSTK dan yang tidak terlibat. Meskipun tidak diekspresikan secara terbuka, ketidaksenangan anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Coremap terhadap kelompok yang lainnya dapat dirasakan selama penelitian dilaksanakan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, cakupan kelompok target dari kegiatan-kegiatan Coremap harus diperluas, dengan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat, khususnya mereka yang selama ini tidak menjadi bagian dari kegiatan program tersebut.

Dari sisi ekonomi, penelitian ini menemukan perubahan yang positif setelah dilaksanakannya Coremap selama sekitar empat tahun. Selama periode 2006-2009 (T0-T2) pendapatan rumah tangga yang menjadi sampel survei di kedua lokasi penelitian mengalami peningkatan. Di Desa Mattiro Bombang, khususnya, pendapatan rata-rata rumah tangga sampel berfluktuasi selama masa T0-T1 dan T1-T2, yaitu meningkat selama periode T0-T1 dan menurun pada T1-T2. Meskipun demikian, jika dilihat selama tiga tahun penelitian, pendapatan rata-rata rumah tangga sampel di desa tersebut meningkat sebesar 11,2 persen per tahun, yaitu dari Rp. 547.250,-/bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 752.190,-/bulan pada tahun 2009. Pendapatan per kapita anggota rumah tangga sampel juga mengalami peningkatan dari Rp. 116.960,-/bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 170.340,-/bulan pada tahun 2009, dengan laju peningkatan per tahun sebesar 13,3 persen. Sejalan dengan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan, penghasilan dari kegiatan kenelayanan juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang sama. Pendapatan rata-rata rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang

dari aktifitas kenelayanan meningkat dari Rp. 423.990,-/bulan menjadi Rp. 694.160,-/bulan (17,9 persen per tahun). Selanjutnya, pendapatan per kapita dari kegiatan tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen setiap tahun (dari Rp. 92.380,-/bulan menjadi Rp. 156.370,-/bulan).

Pola yang sama juga ditemukan di antara rumah tangga responden di Kelurahan Pundata Baji, meskipun tidak terjadi fluktuasi pendapatan selama tiga kali penelitian. Artinya, selama T0-T1 dan T1-T2 terjadi peningkatan pendapatan, dengan persentase yang berbeda setiap periode. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga sampel per bulan meningkat sebesar 7,2 persen setiap tahun selama periode 2006-2009, yaitu dari Rp. 1.109.650,- menjadi Rp. 1.367.753,-. Untuk pendapatan per kapita, peningkatan yang terjadi lebih besar, yaitu 11,5 persen per tahun (dari Rp. 206.050,-/bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 285.670,-/bulan pada 2009). Pendapatan dari kegiatan kenelayanan juga memperlihatkan pola yang sama. Kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan selama 2006-2009 sebesar 1,6 persen per tahun (dari Rp. 656.940,- menjadi Rp. 688.860), sedangkan pendapatan per kapita per bulan meningkat sebesar 16,4 persen setiap tahun (dari Rp. 115.300,- menjadi Rp. 181.890,-).

Peningkatan pendapatan menyebabkan terjadinya perubahan distribusi rumah tangga sampel menurut kelompok penghasilan. Proporsi rumah tangga dengan pendapatan paling rendah (< Rp. 500.000,-/bulan) mengalami penurunan, sebaliknya terjadi peningkatan pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Pada kelompok pendapatan tertinggi (> Rp. 3.000.000,-) juga terjadi peningkatan, yaitu dari 1 persen pada tahun 2006 menjadi 1,6 persen pada 2009 di Desa Mattiro Bombang dan dari 6 persen menjadi 9,2 persen di Kelurahan Pundata Baji pada periode yang sama.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga, sulit untuk mengatakan bahwa hal tersebut semata-mata merupakan dampak positif dari pelaksanaan kegiatan Coremap. Di kedua lokasi penelitian program-program pembangunan lainnya, termasuk yang secara khusus

ditujukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat seperti simpan pinjam perempuan (SPP) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan simpan pinjam Koperasi Usaha Bersama (KUB) serta koperasi Syariah dari sektor koperasi, juga dilaksanakan. Dalam beberapa kasus penerima bantuan dana untuk kegiatan UEP Coremap juga menerima bantuan dari program lainnya. Mengingat perhitungan pendapatan tidak dilakukan dengan memisahkan pendapatan berdasarkan sumber dana bantuan yang diterima, maka sulit untuk mengetahui kontribusi masing-masing bantuan terhadap peningkatan masyarakat. Kemungkinan besar peningkatan pendapatan terjadi karena kontribusi program-program pembangunan, termasuk Coremap, secara bersamaan.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
RANGKUMAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	6
1.3. Metodologi	6
1.4. Gambaran Singkat Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep	9
1.5. Pembabakan Penulisan	15
BAB II PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN COREMAP	17
2.1. Pengetahuan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut	18
2.2. Pengetahuan dan Partisipasi dalam Kegiatan Coremap	20
BAB III MANFAAT SOSIAL-EKONOMI KEGIATAN COREMAP	33
3.1. Manfaat Sosial	34
3.2. Manfaat Ekonomi	42
3.2.1. Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tuppabiring	43
3.2.2. Kelurahan Pundatta Baji, Kecamatan Labakkang	59

BAB IV PENUTUP	75
4.1. Pengetahuan dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kegiatan Coremap	76
4.2. Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDL	79
4.3. Manfaat Sosial Ekonomi	81
DAFTAR PUSTAKA	87

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	45
Tabel 3.2. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan per Bulan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	48
Tabel 3.3. Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata per Bulan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%)	50
Tabel 3.4. Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	52
Tabel 3.5. Kontribusi Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%)	54
Tabel 3.6. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan per Bulan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (Rp.)	56

Tabel 3.7.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%)	57
Tabel 3.8.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima dan Non-Penerima Dana Bergulir Coremap, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009	58
Tabel 3.9.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	61
Tabel 3.10.	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	63
Tabel 3.11.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata per Bulan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2006, 2008, dan 2009 (%)	64
Tabel 3.12.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009	66
Tabel 3.13.	Kontribusi Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%)	67



Tabel 3.14. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (Rp.)	70
Tabel 3.15. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%)	71
Tabel 3.16. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima dan Non-Penerima Dana Bergulir Coremap, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009	73



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Menurut Pemanfaatannya, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N = 29)	23
Gambar 2.2. Papan Informasi di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	24
Gambar 2.3. Distribusi Responden Menurut Manfaat Penggunaan <i>Village Grant</i> , Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=122)	26
Gambar 2.4. Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Menurut Pemanfaataannya, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=29)	29
Gambar 2.5. Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	31
Gambar 2.6. Distribusi Responden Menurut Manfaat Penggunaan <i>Village Grant</i> , Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=120)	32



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan badan pendanaan internasional, yaitu *World Bank* (WB) dan *Asian Development Bank* (ADB)<sup>1</sup> serta *Australian Agency for International Development* (AusAid) telah meluncurkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (*Coremap – Coral Reef Rehabilitation and Management Program*)<sup>2</sup> sejak tahun 1998. Program yang direncanakan akan berlangsung selama 15 tahun dan terbagi dalam tiga tahap<sup>3</sup> ini diluncurkan sebagai respon terhadap kondisi terumbu karang yang buruk serta cenderung mengalami penurunan sepanjang waktu. Keadaan tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu di antaranya adalah di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Kegiatan pemantauan terumbu karang yang dilakukan oleh tim dari Pusat Penelitian Oseonologi-LIPI di 18 lokasi di wilayah kabupaten tersebut mendapatkan bahwa kondisi terumbu karang yang termasuk dalam kategori cukup hanya ditemukan di 7

---

<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan, kedua institusi internasional tersebut berbagi wilayah, yaitu WB bekerjasama untuk pelaksanaan Coremap di wilayah Indonesia Timur dan ADB di wilayah Indonesia Barat. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di kawasan Indonesia bagian timur yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan Coremap.

<sup>2</sup> AusAID hanya terlibat dalam pelaksanaan COREMAP Tahap I.

<sup>3</sup> Tahap I disebut Tahap Inisiasi yang dilaksanakan pada tahun 1998-2004. Selanjutnya, Tahap II dinamakan Tahap Desentralisasi dan Akselerasi yang diselenggarakan pada tahun 2004-2009 serta Tahap III disebut sebagai Tahap Pelembagaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2010-2015 ([http://www.coremap.or.id/tentang\\_coremap/mengenal\\_coremap/](http://www.coremap.or.id/tentang_coremap/mengenal_coremap/)).

lokasi. Di 11 lokasi lainnya kondisi sumber daya laut tersebut termasuk kategori kurang baik. Selanjutnya, dalam kurun waktu satu tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai 2007 terjadi penurunan luas tutupan karang. Jika pada tahun 2006 luasnya adalah 34,68 persen, pada tahun 2007 berkurang menjadi 30,42 persen (Manuputty, dkk., 2007).

Berbagai *stakeholders*, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat lokasi<sup>4</sup> program terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Coremap. Kegiatan-kegiatan tersebut juga bervariasi, baik yang secara langsung berkaitan dengan kondisi fisik terumbu karang maupun yang tidak terkait langsung dengan kondisi fisik sumber daya laut tersebut. *Stakeholders* yang terlibat berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor teknis seperti kelautan dan perikanan dan juga aparat keamanan. Semua *stakeholders* memiliki peran sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing.

Selain untuk melestarikan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya, Coremap juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir (PMO/NCU Coremap II, tanpa tahun). Terumbu karang yang terpelihara merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir dan kepulauan karena menjadi tempat hidup yang subur bagi beragam jenis ikan dan biota laut lainnya. Berdasarkan perhitungan Herman Cesar, seorang ahli ekonomi sumber daya laut, terumbu karang yang terpelihara dengan baik dapat menghasilkan 30 ton ikan per km<sup>2</sup> (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Terumbu karang juga dapat menghasilkan berbagai jenis biota laut lainnya seperti moluska (hewan bertubuh lunak yakni kerang dan siput laut), krustasea (udang-udangan), dan ekinodermata (hewan berkulit duri seperti teripang) serta penyu yang sangat bermanfaat bagi manusia, baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan (<http://www.terangi.or.id/id/>

---

<sup>4</sup> Lokasi Coremap dikenal dengan kawasan. Di beberapa daerah, kawasan mencakup satu desa/kelurahan, sementara di daerah-daerah lain kawasan mencakup wilayah-wilayah tanpa terikat dengan kesatuan administrasi pemerintah.

index.php?option=com\_content&task=view&id=68&Itemid=41). Dengan asumsi tersebut, maka terumbu karang yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat pula menurunkan angka kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Tujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir dijabarkan dalam target yang hendak dicapai Coremap, khususnya dari aspek sosial ekonomi. Target-target tersebut adalah: (1) pada akhir tahun 2009 terjadi peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang serta kegiatan alternatif lainnya sebesar 10 persen dan (2) paling sedikit sebanyak 70 persen masyarakat nelayan (*beneficiaries*) di kabupaten lokasi Coremap merasakan dampak positif program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang ini terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonomi mereka (World Bank, 2004).

Upaya mengurangi kemiskinan dilakukan pula melalui penciptaan dan pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut. Masyarakat pesisir dan kepulauan, khususnya, sangat menggantungkan kehidupan ekonomi pada sumber daya laut, melalui kegiatan kenelayanan. Dalam kenyataannya, pendapatan dari kegiatan tersebut sangat tergantung pada kondisi gelombang laut. Pada saat gelombang kuat, frekuensi melaut masyarakat berkurang dan mereka juga tidak dapat mencari ikan sampai jauh ke tengah laut. Akibatnya, pendapatan masyarakat pada saat gelombang kuat lebih kecil dibanding musim gelombang tenang, sehingga selama satu tahun pendapatan masyarakat berfluktuasi menurut musim gelombang. Menciptakan dan mengembangkan MPA, khususnya yang tidak tergantung pada sumber daya laut memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan secara tetap sepanjang tahun karena tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca.

Kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep dimulai pada tahun 2005 di 20 lokasi, terdiri dari 15 desa/kelurahan di wilayah kepulauan dan 5 desa/kelurahan di daerah pesisir. Dalam perjalanannya, terjadi penambahan lokasi kegiatan, sehingga saat ini program rehabilitasi dan

pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di 37 desa/kelurahan. Enam desa/kelurahan di antaranya berlokasi di wilayah pesisir, sedangkan 31 desa yang lain terletak di daerah kepulauan (Noveria, dkk., 2008). Semua desa/kelurahan lokasi Coremap berada di 10 kecamatan dari 12 kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Pangkep. Dua kecamatan yang tidak terpilih sebagai lokasi Coremap adalah kecamatan yang berlokasi di dataran tinggi dan pedalaman.

Seperti di berbagai daerah lainnya di Indonesia, Coremap di Kabupaten Pangkep mempunyai berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelestarian terumbu karang serta pengelolaan sumber daya laut pada umumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan semua komponen Coremap yaitu *Public Awareness (PA)*, *Community Based Management (CBM)*, *Marine Conservation Area (MCA)*, *Management, Controlling and Surveillance (MCS)*, dan *Coral Reef Information and Training Center (CRITC)*. Tiga dari lima komponen tersebut, yaitu PA, MCS, dan CBM melaksanakan kegiatan-kegiatan yang “mendorong” keterlibatan manusia, khususnya penduduk yang tinggal di wilayah perairan dalam memelihara dan mengelola terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh komponen-komponen Coremap berada di bawah koordinasi *Project Implementation Unit (PIU)* yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat kabupaten.

Banyak faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan Coremap. Faktor-faktor tersebut berasal dari pihak pengelola maupun masyarakat yang menjadi target program. Dari sisi pengelola, kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dan rencana program menjadi salah satu faktor penting bagi tercapainya tujuan. Selanjutnya, dari sisi masyarakat, salah satu faktor penting adalah keterlibatan mereka secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Coremap. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mata pencaharian alternatif merupakan potensi untuk mengurangi kerusakan terumbu karang karena berkurangnya ketergantungan terhadap sumber daya laut. Hal yang



sama juga berlaku pada upaya pengawasan terhadap berbagai aktifitas yang merusak terumbu karang seperti penggunaan armada, alat tangkap, serta bahan-bahan yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya laut tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan patroli dapat menghindari kerusakan terumbu karang, sehingga berbagai jenis ikan dan sumber daya laut lainnya yang hidup di sekitarnya bisa berkembangbiak dengan baik. Sumber daya laut yang melimpah merupakan salah satu pendukung bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah perairan dan pesisir.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Coremap dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang kegiatan yang dilaksanakan. Isu-isu yang terkait dengan pengetahuan antara lain jenis-jenis kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Manfaat yang akan didapat, baik untuk individu, rumah tangga maupun untuk masyarakat pada umumnya melalui keterlibatan dalam kegiatan Coremap juga merupakan pengetahuan yang penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat di lokasi Coremap dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian suatu program dapat dilihat dengan membandingkan berbagai kondisi di lokasi program, termasuk masyarakat, sebelum dan setelah pelaksanaannya. Mengingat salah satu target Coremap berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi kegiatan, maka informasi yang terkait dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah Coremap dilaksanakan sangat diperlukan untuk melihat capaian program. Indikator yang sensitif untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain pendapatan. Pada tahun 2006, sebelum Coremap dilaksanakan (T0) telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendapatan, di lokasi kegiatan. Dua tahun berikutnya (2008 – T1) juga dilakukan penelitian yang sama untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengetahuan tentang Coremap dan kegiatan yang dilaksanakannya, keterlibatan dalam kegiatan Coremap,

serta perilaku masyarakat yang terkait dengan pelestarian terumbu karang dan pengelolaan sumber daya laut pada umumnya. Selanjutnya, penelitian yang sama kembali dilaksanakan pada tahun 2009 untuk mengetahui dampak Coremap terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## 1.2. TUJUAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji capaian pelaksanaan Coremap, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

### *Tujuan Khusus*

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Coremap.
2. Menggambarkan perubahan pendapatan masyarakat dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Menganalisis keterkaitan antara perubahan pendapatan masyarakat dan capaian kegiatan Coremap.
4. Mengkaji manfaat sosial ekonomi, langsung dan tidak langsung, dari kegiatan Coremap.

## 1.3. METODOLOGI

### *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi Coremap di Kabupaten Pangkep. Satu lokasi berada di wilayah kepulauan, yaitu Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, sedangkan satu lokasi lainnya terletak di kawasan pesisir, yaitu Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang. Kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang

sama dengan penelitian pada waktu T0 (tahun 2006) dan T1 (tahun 2008).

### *Pengumpulan Data*

Seperti dua penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2008, data yang dikumpulkan dalam penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data kuantitatif dan juga kualitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan jenis data. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan teknik survei, menggunakan serangkaian pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga, antara lain pendapatan rumah tangga dari berbagai sektor pekerjaan, pengaruh Coremap terhadap kesejahteraan rumah tangga, dan keterlibatan anggota rumah tangga dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Coremap. Kuesioner diisi oleh kepala rumah tangga terpilih atau anggota rumah tangga yang mewakili, sepanjang yang bersangkutan menguasai data yang digali.

Idealnya, kuesioner diisi oleh kepala rumah tangga atau yang mewakili dari semua rumah tangga yang juga terpilih dalam penelitian pada tahun 2006 dan 2008. Namun karena beberapa (rumah tangga) responden tahun 2006 dan 2008 tidak bisa dijumpai saat penelitian dilaksanakan, antara lain karena pindah tempat tinggal atau bepergian ke luar lokasi dalam waktu lama, maka dipilih rumah tangga/responden pengganti. Di Desa Mattiro Bombang jumlah rumah tangga pengganti sekitar 20 persen, sedangkan di Kelurahan Pundata Baji hanya 2 rumah tangga. Jumlah seluruh rumah tangga responden di Desa Mattiro adalah 122 dan di Kelurahan Pundata Baji sebanyak 120 rumah tangga. Dari seluruh rumah tangga di kedua lokasi terdapat masing-masing 29 rumah tangga yang paling sedikit satu orang anggotanya terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang diselenggarakan Coremap.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* – FGD), dan observasi. Narasumber untuk wawancara

mendalam dipilih secara *purposive* dengan beberapa kriteria, terutama menguasai informasi yang hendak digali. Narasumber berasal dari berbagai kalangan, baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Coremap maupun yang tidak terlibat langsung. Narasumber yang terlibat langsung antara lain anggota *Project Management Unit* (PMU) dan koordinator komponen Coremap, *Senior Training Officer* (SETO), fasilitator masyarakat (FM), pengurus Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Coremap. Selanjutnya, narasumber yang tidak terlibat langsung antara lain tokoh-tokoh masyarakat, formal dan informal, serta masyarakat yang tidak menjadi anggota pokmas Coremap.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Data tersebut dikeluarkan oleh berbagai institusi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) pusat dan daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pangkep, serta berbagai laporan pelaksanaan kegiatan Coremap. Selain itu, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari berbagai lembaga penelitian yang terkait dengan topik penelitian juga dikumpulkan untuk memperkaya analisis data.

### *Analisis Data*

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan jenis data. Data kuantitatif dianalisis dengan metode statistik deskriptif, antara lain untuk mengetahui mean, median, serta pendapatan tertinggi dan terendah rumah tangga sampel. Khusus untuk rumah tangga nelayan, juga dilakukan analisis statistik pendapatan menurut musim gelombang laut. Selanjutnya, juga dilakukan analisis tabulasi silang antara variabel-variabel yang terkait dengan pengetahuan dan keterlibatan responden dalam kegiatan Coremap. Data kualitatif dianalisis dengan metode analisis isi terhadap informasi-informasi yang diperoleh dari wawancara

mendalam dan FGD. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema.

#### 1.4. GAMBARAN SINGKAT MENGENAI PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP DI KABUPATEN PANGKEP

Seperti telah dikemukakan di bagian awal bab ini, semua kegiatan Coremap dari masing-masing komponen telah dilaksanakan di kedua lokasi Coremap yang juga menjadi lokasi penelitian ini. Sebagian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, tanpa hambatan yang berarti. Namun demikian, terdapat pula kegiatan yang sulit dilaksanakan karena berbagai kendala yang muncul. Sub bab ini membahas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Coremap serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembahasan difokuskan pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh tiga komponen, yaitu PA, MCS, dan CBM. Hal ini karena kegiatan ketiga komponen tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat yang tinggal di pesisir dan kepulauan. Bahasan ini bermanfaat untuk penyempurnaan kegiatan selama sisa waktu yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, bahasan ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan program sejenis di masa mendatang.

##### *Public Awareness (PA – Penyadaran Masyarakat)*

PA (penyadaran masyarakat) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kelestarian terumbu karang, khususnya, dan pengelolaan sumber daya laut pada umumnya. Penyadaran masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, melibatkan kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten dan di lokasi Coremap. Di tingkat kabupaten, beberapa kegiatan yang terkait dengan penyadaran masyarakat adalah pembuatan berbagai materi yang akan dipakai sebagai media penyadaran masyarakat. Materi-materi tersebut berupa poster, *leaflet*, baju kaos, dan topi yang berisi pesan singkat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya serta cinderamata berupa

gelas dan kalender dengan cetakan atribut Coremap. Materi-materi tersebut kemudian didistribusikan ke lokasi-lokasi Coremap agar pesan-pesan penyadaran sampai kepada masyarakat yang menjadi target program. Poster-poster yang dibagikan ke lokasi Coremap dipasang di tempat-tempat strategis yang sering dikunjungi masyarakat dan baju kaos serta topi dibagikan kepada pengurus dan anggota Coremap, sehingga ketika mereka memakainya pesan-pesan yang tertulis di baju kaos dan topi dapat terbaca. Selain kegiatan-kegiatan di atas, juga dilakukan pelatihan bagi *stakeholders* yang akan berperan dalam menyampaikan pesan-pesan penyadaran kepada masyarakat seperti FM dan motivator desa (MD).

Penyadaran masyarakat sering pula dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi Coremap kepada masyarakat. Sosialisasi diselenggarakan dalam pertemuan-pertemuan dengan kelompok masyarakat. Dalam kegiatan ini FM menyampaikan materi penyadaran, di samping juga memperkenalkan Coremap berikut berbagai aktifitasnya kepada masyarakat. Cara lain yang dilakukan untuk penyadaran masyarakat adalah dengan memutar film yang disertai dengan penyampaian pesan-pesan tentang pentingnya pelestarian terumbu karang dan pengelolaan sumber daya laut pada umumnya. Bagi anak-anak usia sekolah pesan-pesan tersebut juga disampaikan dalam bentuk muatan lokal pada mata pelajaran, khususnya untuk tingkat SD dan SMP. Meskipun materi yang dimuat dalam buku pelajaran muatan lokal berupa pengetahuan mengenai sumber daya laut pada umumnya, namun pesan-pesan tentang pelestarian dan pengelolaan terumbu karang juga dapat ditangkap dari materi tersebut.

Pada kenyataannya, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran masyarakat. Sebagai contoh, pelaksana Coremap di tingkat lokasi, yaitu FM dan MD mengalami kesulitan untuk mendatangi semua wilayah kerja mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena luasnya wilayah yang menjadi lokasi Coremap dan juga tersebar dalam beberapa pulau. FM yang bertugas di Desa Mattiro Bombang tidak hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di desa

tersebut, melainkan juga di dua desa lainnya, padahal wilayah satu desa mencakup 4 atau lebih pulau. Untuk menjangkau semua wilayah kerjanya, diperlukan biaya transportasi yang relatif besar untuk mencarter kapal karena tidak ada sarana transportasi umum yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah kerjanya. Akibatnya, kegiatan penyadaran masyarakat tidak dapat dilaksanakan di semua wilayah yang menjadi lokasi Coremap.

Keadaan yang sama juga dihadapi oleh pelaksana Coremap di wilayah pesisir. Hanya satu orang SETO yang bertugas di seluruh lokasi Coremap (6 desa/kelurahan) di wilayah pesisir. Meskipun untuk mencapai semua lokasi tersebut relatif mudah dibandingkan dengan lokasi di wilayah kepulauan, luasnya wilayah kerja dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran masyarakat. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kegiatan penyadaran masyarakat lebih difokuskan untuk penduduk yang tinggal di sepanjang wilayah pantai. Penduduk yang tinggal agak jauh ke daratan pada umumnya tidak menjadi sasaran (utama) kegiatan penyadaran masyarakat, kemungkinan karena mereka tidak mempunyai ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut dalam melaksanakan aktifitas ekonomi.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran masyarakat juga dihadapi dalam pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal. Hal ini terutama karena terbatasnya materi dan bahan ajar. Buku-buku pelajaran yang tersedia masih terbatas pada tingkat SD, sehingga murid-murid SLTP terpaksa menggunakan buku-buku untuk murid sekolah di tingkat pendidikan yang lebih rendah.

### *Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)*

Komponen MCS mempunyai tanggung jawab utama memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelanggaran dalam kegiatan eksploitasi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Kegiatan MCS dilakukan oleh *stakeholders* yang berasal dari multisektor, termasuk aparat kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Seperti komponen-komponen lainnya, komponen MCS

juga sudah melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh komponen MCS adalah “Apel Siaga” (tahun 2007), pelatihan pokmaswas (pokmas pengawasan), penyusunan statistik perikanan Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, penandaan daerah perlindungan laut (DPL) di kedua kecamatan tersebut, serta pengadaan kapal untuk kegiatan patroli. Empat kegiatan terakhir dilaksanakan pada tahun 2008 (Noveria, dkk. 2008). “Apel Siaga” merupakan kegiatan sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai berbagai isu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut. Materi yang disampaikan antara lain Undang-Undang Perikanan dan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya laut, termasuk larangan-larangan dalam kegiatan eksploitasinya, seperti penggunaan alat, cara dan armada tangkap yang merusak.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, komponen MCS juga melakukan patroli laut, khususnya untuk menangkap pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), yaitu yang menggunakan cara, alat, dan armada tangkap yang terlarang. Semua temuan pelanggaran dilaporkan oleh anggota yang terlibat dalam kegiatan patroli (anggota pokmaswas) kepada pihak kelurahan untuk dilanjutkan ke pihak kepolisian (Polsek di tingkat kecamatan dan Polres di tingkat kabupaten). Namun dalam kenyataan, laporan-laporan yang disampaikan kepada pihak keamanan sangat jarang ditindaklanjuti sampai ke proses hukum (hasil wawancara dengan anggota komponen MCS). Kenyataan ini berdampak negatif terhadap kinerja anggota pokmaswas, antara lain berkurangnya keinginan untuk melakukan patroli.

Dalam melaksanakan kegiatannya, komponen MCS menghadapi beberapa hambatan. Salah satu di antaranya adalah keterlambatan pencairan dana, yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang sesuai dengan rencana. Meskipun pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana,



namun keterlambatan pencairan dana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja program.

### *Community Based Management (CBM)*

CBM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat – PBM) merupakan komponen utama Coremap (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Hal ini berimplikasi bahwa masyarakat menjadi titik sentral dalam pelaksanaan semua kegiatan Coremap, tidak hanya sekedar menjadi obyek program. Sesuai dengan azas kegiatan Coremap, yaitu “dari, oleh, dan untuk masyarakat” dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat didorong dan ditingkatkan kemampuannya untuk mengorganisir diri, termasuk dalam merencanakan dan menentukan pilihan kegiatan Coremap secara musyawarah. Oleh karena itu, komponen CBM bertanggungjawab untuk mendorong keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan Coremap di lokasi, akan tetapi juga merencanakannya sejak awal.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan di bawah koordinasi komponen CBM. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pembentukan LPSTK, pelatihan bagi MD, FM, dan SETO, serta pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pelatihan bagi pengurusnya. Pembentukan LPSTK dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dari masing-masing wilayah (RW dan RT) serta pemimpin (formal dan informal) di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Materi yang diberikan pada pelatihan bagi MD, FM, dan SETO mencakup berbagai keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan masyarakat, khususnya yang berpartisipasi dalam kegiatan pokmas-pokmas Coremap. Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) serta pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan oleh MD, FM, dan SETO juga merupakan materi yang diberikan dalam pelatihan (Coremap II & Eco-Natural Society Kabupaten Pangkep, 2006). Bagi pengurus LKM, pelatihan difokuskan pada pengelolaan dana *seed fund*, yaitu dana bergulir bantuan Coremap yang diberikan kepada anggota pokmas produksi. Dana tersebut bersifat pinjaman yang penggunaannya

untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, dengan pengembalian secara cicilan.

Di samping pelatihan untuk pengurus dan pengelola Coremap, komponen CBM juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat di lokasi, khususnya anggota pokmas Coremap. Materi pelatihan antara lain keterampilan yang diperlukan untuk usaha ekonomi produktif. Anggota pokmas jender, misalnya pernah memperoleh pelatihan pembuatan sirup, permen, serta dodol dari rumput laut. Namun sayangnya, frekuensi pelatihan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sangat terbatas, sehingga penguasaan masyarakat terhadap keterampilan yang diberikan juga sangat terbatas. Oleh karena itu, usaha ekonomi produktif, terutama untuk jenis-jenis kegiatan yang baru bagi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Kegiatan lain yang juga menjadi tanggung jawab komponen CBM adalah usaha ekonomi produktif. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya yang terlibat dalam kegiatan Coremap meningkatkan penghasilan. Hal ini mendukung salah satu tujuan Coremap, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir.

Berbeda dengan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan secara berkelompok oleh anggota pokmas Coremap di wilayah barat Indonesia seperti di Kota Batam (Noveria & Aswatini, 2007; Romdiati & Noveria, 2007) usaha ekonomi produktif di Kabupaten Pangkep dilaksanakan secara individual. Penerima bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif memperoleh pinjaman modal usaha dengan jumlah sekitar Rp. 1.000.000,- - Rp. 2.000.000,-. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dilaksanakan antara lain perbengkelan, perdagangan (komoditas sumber daya laut seperti ikan dan udang serta barang-barang kebutuhan sehari-hari) dengan skala kecil, serta nelayan.

Tidak semua penerima bantuan mengembalikan cicilan dengan tertib, dalam arti membayarnya setiap bulan. Di Desa Mattiro Bombang beberapa peminjam menunggak pembayaran, sehingga pengurus LKM

harus aktif menagih cicilan agar dana bantuan bisa digulirkan kepada calon penerima lainnya. Sebagian penerima bantuan menganggap bahwa dana yang diterima merupakan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma (masyarakat menyebut sebagai “uang mati”), dan karenanya tidak harus dikembalikan. Sikap masyarakat yang seperti ini menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi produktif yang didanai Coremap. Bertolak dari kenyataan tersebut, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif. Jika anggapan bahwa dana *seed fund*, yang dipinjamkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, adalah pemberian dari pemerintah masih kuat dipegang masyarakat, maka kelangsungan kegiatan tersebut sulit dipertahankan.

## 1.5. PEMBABAKAN PENULISAN

Buku ini terdiri dari empat bab dengan fokus bahasan yang berbeda-beda pada masing-masing bab. “Pendahuluan” merupakan bab pertama yang berisi informasi tentang latar belakang penelitian tahun ketiga ini. Selain latar belakang, dalam bab ini juga dikemukakan tujuan penelitian, metode yang digunakan, baik untuk pengumpulan maupun analisa data, serta gambaran singkat mengenai hasil dua penelitian sebelumnya (2006 dan 2008) yang merupakan satu rangkaian dengan penelitian tahun 2009 ini. Bab selanjutnya membahas pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Praktek-praktek pengelolaan sumber daya laut, khususnya melalui penggunaan armada dan alat tangkap yang tidak merusak serta pengelolaan hasil tangkapan menjadi bahasan dalam bab ini. Selanjutnya, pengetahuan masyarakat di kedua lokasi penelitian tentang Coremap dan semua kegiatan yang dilaksanakannya serta partisipasinya mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi bahasan dalam Bab II. Bab III membahas manfaat Coremap dari sisi sosial dan ekonomi. Manfaat semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Coremap, baik pembangunan fisik yang dibiayai dari *village grant* dan non fisik, yaitu pemberian bantuan

dana bergulir untuk usaha ekonomi yang dikenal sebagai *seed fund*, bagi kehidupan sosial masyarakat di lokasi penelitian dikaji dalam bab ini. Dari sisi ekonomi, manfaat Coremap dilihat berdasarkan peningkatan pendapatan masyarakat, baik pendapatan rumah tangga secara keseluruhan maupun pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Untuk mengkaji peningkatannya, dilakukan perbandingan pendapatan masyarakat pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas perbedaan pendapatan rumah tangga anggota pokmas Coremap dan bukan anggota pokmas. Buku ini ditutup dengan Bab IV yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Secara spesifik bab ini memberi penekanan pada manfaat sosial dan ekonomi program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut.



## BAB II

### PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN COREMAP

**S**ebelum suatu program pembangunan dilaksanakan, penting dilakukan pemberian pengetahuan mengenai semua hal yang terkait dengan program kepada masyarakat. Pengetahuan yang perlu diberikan antara lain jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta mekanisme pelaksanaannya. Pengetahuan yang memadai tentang program yang akan dilaksanakan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan program tersebut. Kedua aspek ini selanjutnya dapat berkontribusi bagi keberhasilan program.

Selain memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan, pengelola program penting pula mengetahui berbagai hal mengenai kondisi masyarakat, agar program yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan situasi yang aktual. Terkait dengan Coremap, salah satu aspek yang perlu diketahui adalah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sumberdaya laut serta partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Dengan memahami pengetahuan mereka, dapat diketahui faktor-faktor yang melandasi praktek-praktek pengelolaan sumberdaya laut yang selama ini dilakukan masyarakat.

Bab ini mendeskripsikan pengetahuan dan partisipasi masyarakat di lokasi kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep (Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji) baik dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya laut secara umum maupun dalam kegiatan Coremap yang dilaksanakan pada kedua wilayah tersebut.

## 2.1. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

Pada penelitian ini, dua lokasi kegiatan Coremap yang menjadi fokus kajian memiliki perbedaan karakteristik tipologi wilayah. Perbedaan ini memunculkan adanya perbedaan pola pemanfaatan sumberdaya laut di antara dua wilayah tersebut. Di Desa Mattiro Bombang yang merupakan wilayah kepulauan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Hasil survei BME Coremap tahun 2009 menunjukkan 80 persen penduduk usia kerja pada rumah tangga responden memiliki mata pencaharian di bidang kelautan (Noveria, dkk., 2006). Hal ini dapat menggambarkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat setempat terhadap sumberdaya laut. Sementara itu di Kelurahan Pundata Baji, dengan karakteristik wilayah daratan pesisir, hasil survei menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja sebagai nelayan tidak terlalu besar (21,7 persen). Penduduk yang bekerja sebagai nelayan pada umumnya bermukim di wilayah pantai. Bagi penduduk yang bermukim di daratan, jenis kegiatan perikanan yang cukup banyak dilakukan adalah perikanan budidaya, khususnya ikan bandeng (28,3 persen).

Nelayan di kedua lokasi penelitian telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam penggunaan alat tangkap yang aman bagi lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat dari jenis alat tangkap yang umumnya digunakan oleh nelayan setempat yaitu bubu, jaring dan pancing rawai. Meskipun begitu, permasalahan pengelolaan sumberdaya perikanan tetap muncul akibat cukup banyak nelayan dari luar wilayah yang menangkap ikan di perairan wilayah Mattiro Bombang dan Pundata Baji dengan menggunakan cara dan alat tangkap yang merusak lingkungan, misalnya bom, *trawl* atau *mini trawl*. Selain akibat masih lemahnya koordinasi sistem pengawasan dan penegakan hukum, hambatan lain yang dihadapi adalah masih tertinggalnya teknologi armada tangkap yang dimiliki nelayan setempat, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak ketika harus berhadapan dengan kapal-kapal nelayan dari luar wilayah yang menggunakan bom di perairan sekitar desa mereka.

Adanya kesadaran yang tinggi di kalangan nelayan untuk menggunakan alat dan armada tangkap yang tidak merusak bukan berarti pengelolaan sumberdaya laut tidak menghadapi permasalahan. Di kedua lokasi masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, antara lain adanya kecenderungan eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan yang dilakukan oleh para nelayan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan industri pengolahan yang berbahan dasar sumber daya perikanan, para nelayan berusaha menangkap ikan atau kepiting sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan aspek kelangsungan hidup komoditas perikanan tersebut.

Contoh yang dapat dicermati akibat menjamurnya industri pengupasan kepiting di Desa Mattiro Bombang adalah kegiatan penangkapan kepiting yang dilakukan hampir sepanjang waktu tanpa mempertimbangkan ukurannya. Hal ini dilakukan nelayan untuk memasok bahan baku bagi industri tingkat rumah tangga tersebut. Kepiting merupakan komoditas perikanan yang bersifat musiman, Pada musim gelombang kuat, jumlahnya sangat banyak, sementara pada gelombang tenang, jumlahnya menjadi sangat sedikit. Namun kegiatan industri pengolahan umumnya tetap berjalan meskipun pada musim gelombang tenang. Hal ini yang kemudian mengakibatkan nelayan tetap menangkap kepiting untuk memenuhi permintaan dari industri. Meskipun sebagian kecil nelayan sadar bahwa mereka tidak seharusnya menangkap kepiting yang berukuran kecil sebab akan dapat mengancam keberadaan komoditas perairan tersebut, namun tuntutan ekonomi mendorong mereka untuk tetap menangkap kepiting berukuran kecil.

Selain kegiatan penangkapan ikan, salah satu jenis pemanfaatan sumberdaya laut yang dikembangkan di wilayah penelitian adalah budidaya rumput laut, khususnya di Desa Mattiro Bombang. Kegiatan ini belum berkembang secara luas di masyarakat, namun adanya bantuan bibit dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep serta beredarnya informasi mengenai keberhasilan usaha budidaya rumput laut yang dilakukan oleh nelayan di wilayah lain membuat kegiatan budidaya jenis komoditas ini cukup diminati oleh beberapa kelompok masyarakat.

Kasus di Desa Mattiro Bombang menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang memulai kegiatan budidaya rumput laut secara swadaya. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa orang pengurus LPSTK dan pokmas produksi Coremap yang dibimbing oleh fasilitator masyarakat di wilayah tersebut. Namun kegiatan budidaya yang dilakukan kelompok ini mengalami hambatan akibat terjadi fluktuasi harga rumput laut yang sangat tajam. Harga rumput laut umumnya sangat tinggi pada awal masa penanaman, namun ketika mendekati masa panen harga komoditas ini menjadi sangat merosot. Dengan demikian, kegiatan ini lebih banyak mengalami kerugian. Hal ini membuat masyarakat mulai ragu untuk meneruskan usaha budidaya ini. Selain itu, budidaya rumput laut yang memerlukan usaha perawatan yang rutin dan tekun membuat masyarakat enggan melanjutkan kegiatan ini.

Tidak banyak kegiatan pengolahan sumberdaya laut yang dilakukan oleh masyarakat di kedua lokasi penelitian. Pemanfaatan sumberdaya perikanan umumnya hanya terbatas pada penangkapan dan pengolahan beberapa jenis ikan tertentu melalui pengeringan sehingga menghasilkan ikan asin sebagai produk akhir. Ikan asin yang dihasilkan nelayan selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul yang membelinya ke rumah-rumah. Selain itu, industri pengolahan komoditas perikanan di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji masih terbatas pada pengolahan sederhana, seperti industri pengupasan kepiting. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan hasil laut menyebabkan belum banyak jenis usaha pengolahan komoditas tersebut di kedua lokasi penelitian.

## **2.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN COREMAP**

Keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat setempat, antara lain mengenai tujuan dan jenis-jenis kegiatan yang terkait dengan program tersebut. Keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dijalankan juga turut menentukan pencapaian tujuan program yang digulirkan. Program-



program yang terkait dengan keberadaan kegiatan Coremap di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Pangkep dapat dicermati melalui keberadaan lembaga masyarakat, pelaksanaan pelatihan, serta pemanfaatan *village grant* dan penyaluran *seed fund* yang merupakan dana bergulir.

Pelaksana kegiatan Coremap di tingkat desa/kelurahan adalah Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dengan kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang berada di bawahnya, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kedua lembaga ini berada di bawah koordinasi langsung CBM Coremap II Kabupaten Pangkep. Jika LPSTK dibentuk sebelum pelaksanaan kegiatan Coremap di tiap lokasi dimulai, LKM dibentuk setelah kegiatan Coremap dilaksanakan. LKM merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyalur dana bergulir yang ditujukan sebagai bantuan untuk usaha ekonomi produktif masyarakat. Pokmas-pokmas yang berada di bawah LPSTK adalah pokmas konservasi, pokmas usaha ekonomi produktif, dan pokmas gender.

Dalam pelaksanaannya di lokasi kegiatan, aktivitas LPSTK dan LKM sangat bergantung pada kucuran dana dari pihak PMU Coremap. LPSTK bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pokmas Coremap serta penggunaan *village grant*, sedangkan LKM berfungsi sebagai pengelola *seed fund*. Kegiatan lain yang juga dilaksanakan oleh Coremap II Pangkep adalah pelatihan, yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan serta peningkatan pengetahuan masyarakat.

Berikut ini dijabarkan beberapa aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji, terutama aspek pengetahuan masyarakat tentang berbagai kegiatan Coremap dan partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

### *Desa Mattiro Bombang*

Kegiatan LPSTK dan LKM di Desa Mattiro Bombang umumnya hanya berfokus pada pengelolaan dana bantuan, baik melalui skema *village*

*grant* ataupun *seed fund*. *Village grant* yang dikucurkan setahun sekali, menimbulkan kesan bahwa aktivitas LPSTK hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, terutama setelah dana turun. Sementara itu, LKM yang berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, umumnya melakukan aktivitasnya sepanjang waktu. Hal inilah yang membuat kebanyakan masyarakat di Mattiro Bombang mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Coremap hanya simpan pinjam. Akhirnya banyak yang berasumsi bahwa Coremap hanya identik dengan lembaga simpan pinjam, seperti halnya lembaga simpan pinjam lainnya yang ada di wilayah ini.

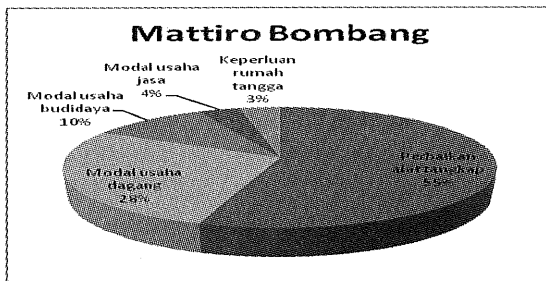
Fungsi lain dari lembaga Coremap, terutama LPSTK, yang terkait dengan pelestarian terumbu karang ataupun perubahan perilaku dalam pengelolaan sumberdaya laut menjadi terabaikan. Tidak banyak kegiatan konservasi ataupun pengawasan sumberdaya laut yang dilakukan oleh LPSTK Mattiro Bombang meskipun pada awal kegiatan Coremap di wilayah ini dibentuk pokmaswas (kelompok masyarakat pengawasan) serta dilakukan penandaan DPL (Daerah Perlindungan Laut) dan pemasangan rumpon di semua pulau yang termasuk dalam wilayah desa ini. Anggota pokmaswas tidak bisa menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal akibat terkendala keterbatasan biaya operasional yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan patroli. Selain itu, batas-batas DPL yang berada di sekitar perairan Busung Torajae mulai menghilang, sehingga banyak nelayan yang tidak dapat mengidentifikasi keberadaan DPL tersebut.

Saat penelitian ini dilakukan, pengguliran *seed fund* di Desa Mattiro Bombang telah berjalan hampir setahun. Kegiatan ini dapat dikatakan berjalan cukup lancar, yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah anggota masyarakat yang menerima bantuan dana bergulir. Jumlah penerima bantuan pada awal pengguliran dana sekitar 50 orang dan saat ini meningkat menjadi sekitar 70 orang (hasil wawancara dengan pengurus LKM). Dana bergulir umumnya digunakan oleh responden penerima bantuan untuk memperbaiki alat tangkap (55 persen) dan untuk modal usaha dagang (28 persen) (lihat Gambar 2.1).

Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan sehingga dapat dimaklumi jika sebagian besar responden penerima dana bergulir di Desa Mattiro Bombang menggunakan bantuan yang diterimanya untuk memperbaiki alat tangkap. Pemanfaatan bantuan *seed fund* untuk modal usaha dagang pada umumnya dilakukan oleh penerima bantuan perempuan.

Jika dicermati menurut lokasi tempat tinggal, maka penerima *seed fund* di Mattiro Bombang umumnya merupakan masyarakat yang bermukim di sekitar pondok informasi ataupun yang tinggal di sekitar rumah pengurus LPSTK dan LKM. Sementara penduduk di bagian wilayah lainnya, umumnya mendapat dana bantuan namun dari skema bantuan pemerintah lainnya seperti KUB (Koperasi Usaha Bersama), Koperasi Syariah ataupun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Hal ini kemungkinan akibat penyampaian informasi kegiatan Coremap yang belum merata ke seluruh wilayah desa, sehingga pada akhirnya terdapat beberapa bagian wilayah desa yang sama sekali asing terhadap kegiatan Coremap. Kerap pula terjadi adanya anggota masyarakat yang mengetahui kegiatan simpan pinjam yang dilakukan Coremap, namun mereka tidak memiliki informasi mengenai cara mengakses dana tersebut. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan pandangan bahwa kegiatan Coremap hanya ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu.

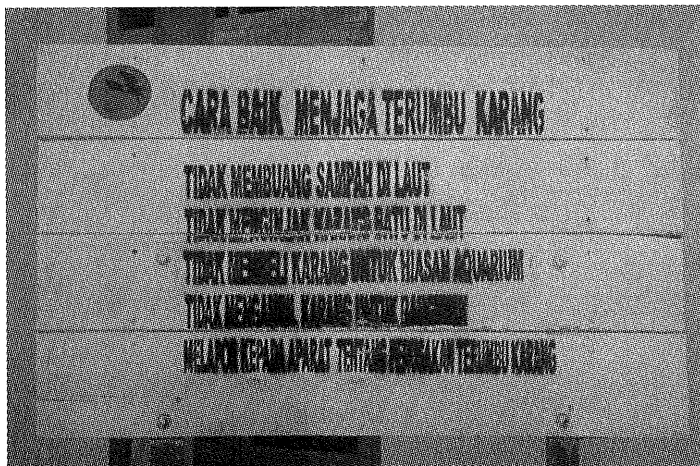
Gambar 2.1  
Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Menurut Pemanfaatannya, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N = 29).



Sumber : Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Selain pengguliran dana *seed fund*, kegiatan lembaga pengelola Coremap di Desa Mattiro Bombang juga meliputi pemanfaatan dana *village grant*. Pencairan dana *village grant* telah dilakukan dalam dua tahun anggaran, yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2008. Pada tahun anggaran 2007, *village grant* dimanfaatkan untuk pembangunan *info centre* (pondok informasi), pengadaan mebel *info centre*, dan pembuatan papan informasi (Gambar 2.2) serta pembuatan rumpon. Sementara itu, dana tahun anggaran 2008 yang baru cair pada awal tahun 2009 sejauh ini telah dimanfaatkan untuk pengadaan batas wilayah DPL dan komputer untuk *info centre*. Kegiatan pemanfaatan dana *village grant* yang masih dalam tahap perencanaan adalah pengadaan pos pengawasan terumbu karang di Gusung Torajae serta pengadaan pelatihan rumput laut bagi masyarakat Mattiro Bombang yang sedang melakukan usaha budidaya rumput laut (hasil wawancara dengan pengelola Coremap di tingkat desa).

Gambar 2.2  
Papan Informasi di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan.

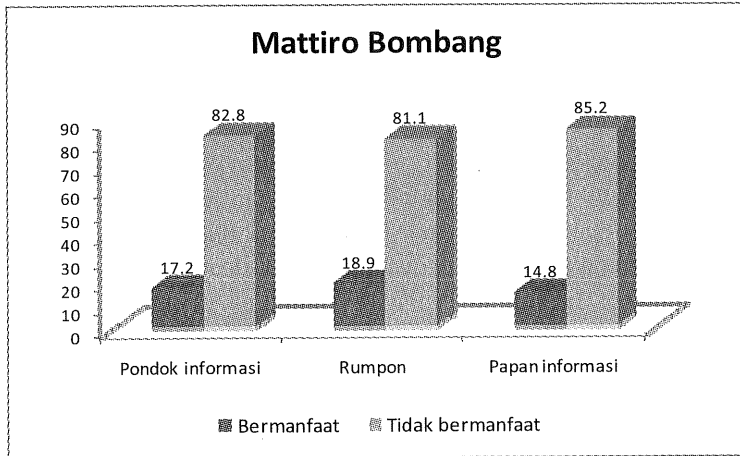


Jika dicermati lebih lanjut, pemanfaatan *village grant* di Desa Mattiro Bombang dapat dikatakan lebih bersifat internal, yaitu hanya untuk kepentingan LSPTK dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Coremap setempat. Meskipun pihak pengurus LPSTK menyatakan bangunan fisik hasil pemanfaatan *village grant* dapat diakses oleh masyarakat umum, dalam kenyataannya hanya segelintir masyarakat yang mengetahui hasil pembangunan fisik yang dilakukan LSPTK. Selain itu, hanya sebagian kegiatan pembangunan yang diketahui masyarakat, misalnya pemasangan papan informasi yang berisi himbauan tentang cara menjaga terumbu karang. Papan informasi yang berjumlah dua buah ini diletakkan di depan kantor Kepala Desa serta di depan *info centre*. Tidak banyak masyarakat yang menyadari keberadaan kedua papan ini, terutama akibat bentuk fisik papan yang tidak mencolok mata (*eye catching*) sehingga masyarakat kadang melewati begitu saja keberadaan papan tersebut.

Kegiatan pembangunan lainnya yang didanai melalui *village grant* adalah pembuatan rumpon yang pada awalnya bertujuan menyediakan wilayah pemancingan (*fishing ground*) khusus bagi nelayan Desa Mattiro Bombang. Dalam kenyataannya, keberadaan rumpon tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang mengetahui kegiatan pemasangan rumpon, namun mereka tidak dapat mengidentifikasi keberadaan rumpon tersebut, terutama akibat banyaknya tanda batas rumpon yang telah hilang.

Hasil penelitian ini memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai *village grant*. Hanya sebesar 7,4 persen dari seluruh responden penelitian yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembangunan fisik dengan dana yang bersumber dari *village grant* kemungkinan besar berdampak terhadap rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Akibatnya, tidak mengherankan jika banyak anggota masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan fisik yang dilakukan menggunakan *village grant* tidak bermanfaat bagi mereka (Gambar 2.3).

Gambar 2.3  
Distribusi Responden Menurut Manfaat Penggunaan *Village Grant*, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=122).



Sumber : Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Coremap di Desa Mattiro Bombang belum dapat mencakup seluruh kelompok masyarakat di desa ini. Pada waktu-waktu mendatang diharapkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Coremap, terutama dalam pelaksanaan jenis-jenis kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas adalah pelatihan budidaya rumput laut, yang pada waktu penelitian ini dilakukan baru pada tahap perencanaan. Pelaksanaan pelatihan budidaya rumput laut ini diharapkan bisa berdampak positif bagi keberadaan kegiatan Coremap di Mattiro Bombang, sebab pelatihan yang pernah diadakan oleh Coremap umumnya hanya ditujukan bagi pengurus lembaga Coremap.

## *Kelurahan Pundata Baji*

Kelembagaan Coremap di Kelurahan Pundata Baji memiliki fungsi dan tugas yang serupa dengan kelembagaan Coremap yang ada di Desa Mattiro Bombang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua lokasi penelitian, yaitu peran Senior Fasilitator (Seto) yang cukup menonjol di Pundata Baji. Seto yang juga bermukim di wilayah kelurahan ini memungkinkan fungsi pendampingan dan pembimbingan yang diembannya dapat berjalan lancar. Peran besar Seto ini dapat dicermati dalam kegiatan pengguliran *seed fund* ataupun pemanfaatan *village grant*. Sebagai contoh, Seto menyerahkan mekanisme pengelolaan *seed fund*, yang terkait dengan besarnya persentase bunga pinjaman kepada pengurus LKM di lokasi ini, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan pengguliran dana, seperti yang tergambar dalam petikan pernyataan narasumber sebagai berikut,

... Ada yang 1,5, ada yang 1 persen, simpanan pokoknya juga beda-beda, ada yang 10 ribu, ada yang 25 ribu, ada yang 50 ribu. Nah ini kan termasuk dana pihak ketiga yang digulirkan kembali juga gitu, tetapi memang saya sampaikan satu tahun kita mau lihat apa bisa hidup dengan bunga ini, ternyata kan tidak ada yang teriak, berarti kan hidup kan gitu, iya kan, jadi saya tidak pernah melihat bagaimana bunga itu, yang jelas induknya saya lihat bergulir, ada yang sampai sudah 84 orang, ada 59, karena tergantung dari banyaknya juga, yang banyak-banyak orangnya ini, ini kan biasa ada yang pinjam 500, ada yang 700, banyak-banyak juga kena, tetapi ada juga yang pinjam sampai 2,5 juta itu agak lambat pergulirannya dia, pembayarannya tetap ya, tapi bunganya itu dia sendiri yang baku bagi gitu, ada kesepakatan itu kita bikin, jadi itu jalan itu (*wawancara dengan Seto Pesisir Coremap II Pangkep*).

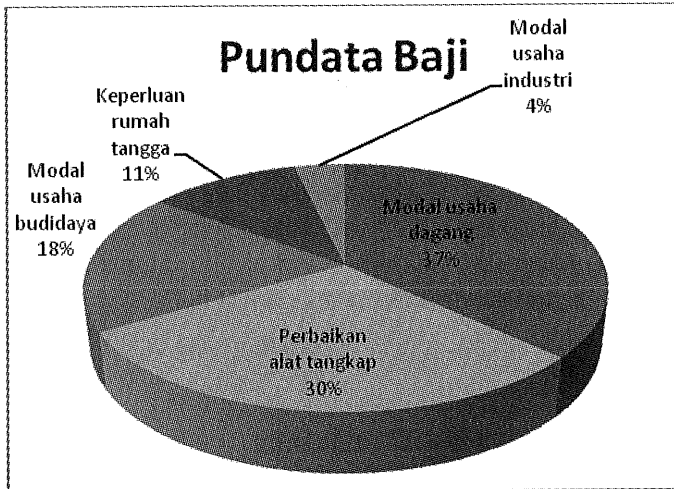
Wewenang yang diberikan oleh Seto kepada pengurus LKM setempat membuat kegiatan pengguliran *seed fund* di Kelurahan Pundata Baji

berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerima bantuan yang meningkat menjadi sekitar 70 orang atau mengalami peningkatan dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah penerima bantuan pada awal pengguliran yaitu sekitar 50 orang. Selain itu, pelatihan keuangan yang diberikan oleh pihak Coremap II Pangkep juga sangat dirasakan manfaatnya oleh pengurus LKM, karena sangat membantu dalam pelaksanaan tugas mereka.

Beberapa masalah muncul terkait dengan pengguliran *seed fund* ini. Contohnya, terdapat responden penerima bantuan yang menggunakan bantuan *seed fund* bukan untuk kegiatan ekonomi produktif, melainkan untuk konsumsi rumah tangga. Padahal sebelumnya telah ditetapkan aturan bahwa syarat utama agar dapat menerima guliran dana ini adalah calon penerima bantuan telah mempunyai usaha ekonomi produktif sehingga dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi tersebut. Meskipun proporsi penduduk yang menggunakan *seed fund* untuk keperluan rumah tangga tidak terlalu besar, namun tidak tertutup kemungkinan dalam kenyataannya jumlah penerima bantuan untuk tujuan konsumsi rumah tangga ini jauh lebih besar. Tidak seperti pada awal pelaksanaan pengguliran *seed fund* yang didahului dengan tahap verifikasi data pemohon bantuan, pada pengguliran dana selanjutnya pihak pengurus LKM umumnya tidak lagi melakukan verifikasi. Akibatnya, terdapat sebagian kecil dana bergulir yang salah sasaran, misalnya kepada pegawai negeri ataupun karyawan yang telah memiliki penghasilan tetap, sehingga pemanfaatannya pun tidak lagi untuk usaha ekonomi produktif. Pemanfaatan dana bergulir oleh responden penelitian di Kelurahan Pundata Baji dapat dicermati pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4  
 Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Menurut  
 Pemanfaatannya, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten  
 Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=29).



Sumber : Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi  
 Coremap, 2009.

Penerima *seed fund* di Kelurahan Pundata Baji umumnya mengelompok di daerah pesisir, dimana para penduduknya bekerja sebagai nelayan. Hal ini dapat dimaklumi sebab kegiatan Coremap memang lebih banyak ditujukan untuk penduduk yang tinggal di daerah pesisir atau yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada sumberdaya laut. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan Coremap juga lebih banyak diperoleh penduduk di daerah pesisir dibandingkan dengan penduduk di wilayah daratan. Penduduk Kelurahan Pundata Baji yang tinggal di daerah daratan yang umumnya bekerja sebagai nelayan budidaya ataupun petani memperoleh bantuan untuk kegiatan ekonomi melalui skema pembiayaan lainnya seperti Dinas Pertanian ataupun program PNPM.

Peran Seto di wilayah ini yang juga terlihat jelas adalah dalam pemanfaatan *village grant*. Penggunaan *village grant* utamanya dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa (misalnya pembangunan bak air, MCK, atau jalan), rehabilitasi dan konservasi (misalnya perumusan perdes, penentuan DPL, transplantasi karang), serta usaha pengembangan masyarakat (melalui pelatihan, misalnya pelatihan pengolahan ikan ataupun pelatihan pemeliharaan ikan hias). Meskipun demikian, Seto di wilayah Pundata Baji tidak menyarankan penggunaan *village grant* untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur desa umumnya membutuhkan biaya yang besar, sehingga tidak sebanding dengan jumlah dana yang diberikan oleh pihak Coremap, seperti yang dikemukakan dalam petikan wawancara berikut ini,

T: memang boleh pak *village grant* itu dipakai untuk infrastruktur desa?

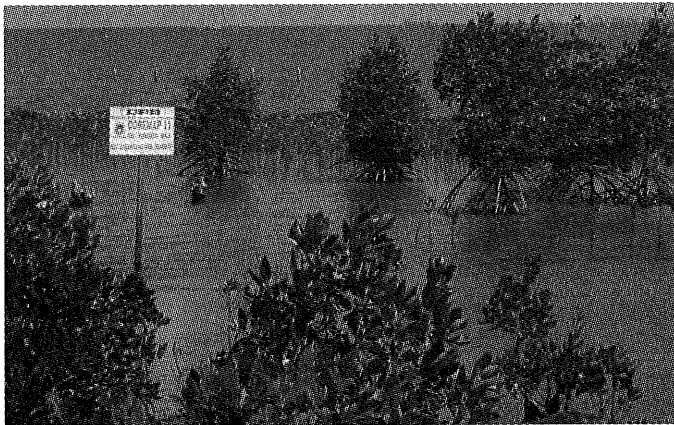
J: boleh untuk infrastruktur desa itu, cuma selama ini kan kita tidak terlalu banyak untuk mensetting apa namanya usulan-usulan dari desa, karena saya pikir itu bisa diatur di APBD, dan kadang dibidang saya mau bikin begini, saya bilang jangan pak, itu mi saja di APBD pak, ini kan berapa sih dananya, yang memang tidak bisa di-APBD-kan itu pengadaan bak-bak itu, itu kan masyarakat juga nilainya, kalau misalnya cuma 2 biji berapa kan APBD susah juga menunggunya itu, sehingga itulah yang kita fasilitasi, eh masuk juga di rehabilitasi mangrove, kita nanam, beli bibit, kita bikin daerah perlindungan sendiri, sekalipun tidak dikenal di Coremap itu, daerah perlindungan mangrove, kan cuma DPL, tapi okelah kita bikin kayak Tekolabua itu ada sekitar 2 km panjangnya dengan lebar sekitar 100 m, kita kasih patok beton bu ya untuk menandakan itu sehingga tidak seenaknya lagi masuk di situ, nah itulah sudah bagus lah pertumbuhannya, karena bibit langsung ya sekitar 70

persen tumbuh lah (wawancara dengan Seto Pesisir  
Coremap II Pangkep)

LPSTK Kelurahan Pundata Baji telah mengalokasikan *village grant* di wilayah mereka untuk penanaman mangrove (Gambar 2.5), pembuatan MCK dan bak air, serta pembangunan pagar kelurahan. Jika dibandingkan dengan pemanfaatan *village grant* di Mattiro Bombang, maka hasil pembangunan fisik yang dilakukan di Pundata Baji lebih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Keberadaan MCK dan bak air yang memang dibutuhkan masyarakat setempat, terutama masyarakat pesisir, membuat masyarakat umum dapat merasakan manfaat pelaksanaan kegiatan Coremap di Kelurahan Pundata Baji.

Gambar 2.5

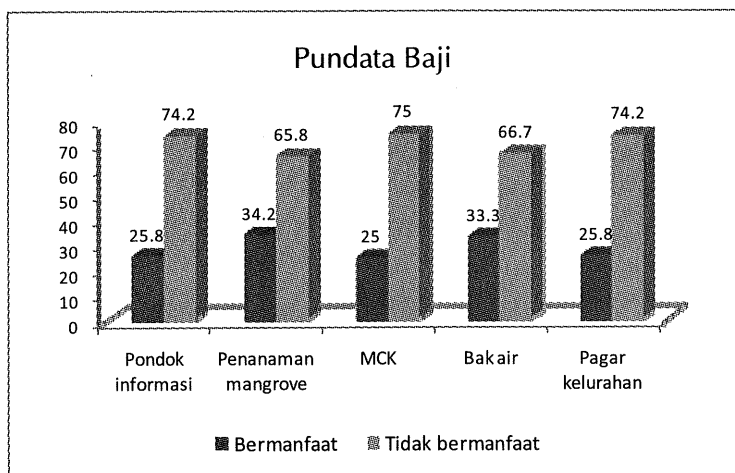
Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Meskipun banyak kegiatan pembangunan fisik dengan sumber dana dari *village grant*, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tersebut di wilayah ini cukup rendah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hanya 15,8 persen responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik. Umumnya penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik ini adalah pengurus LSPTK dan LKM ataupun para anggota pokmas. Sejalan dengan itu, hanya sebagian kecil

responden yang menyatakan mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui skema pembiayaan *village grant* (Gambar 2.6). Hal ini dapat dimengerti sebab kegiatan Coremap di Kelurahan Pundata Baji memang hanya ditujukan untuk sebagian wilayah administratif kelurahan ini, yaitu berfokus pada daerah pesisir.

Gambar 2.6  
Distribusi Responden Menurut Manfaat Penggunaan *Village Grant*, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2009 (N=120).



Sumber : Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

### BAB III

## MANFAAT SOSIAL-EKONOMI KEGIATAN COREMAP

Coremap merupakan kegiatan pengelolaan terumbu karang yang diselenggarakan dari aspek ekologi dan sosial ekonomi. Dari sisi ekologi kegiatan-kegiatan program tersebut mencakup semua upaya yang secara langsung terkait dengan pelestarian terumbu karang (secara fisik) seperti transplantasi karang dan juga menjaga terumbu karang dari aktifitas-aktifitas manusia yang merusak, sehingga mengancam kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, dari aspek sosial ekonomi kegiatan yang dilaksanakan adalah yang secara tidak langsung dapat melestarikan terumbu karang, antara lain merubah sikap dan prilaku masyarakat terhadap sumber daya laut, termasuk mengurangi kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang. Selain itu, mendorong masyarakat untuk berperilaku yang tidak merusak dalam melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya laut juga merupakan salah satu kegiatan Coremap dari sisi sosial-ekonomi.

Bab ini membahas manfaat Coremap dari aspek sosial dan ekonomi. Pembahasan mengenai aspek sosial mencakup dampak Coremap terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, juga dibahas perubahan prilaku masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Pembahasan tentang manfaat ekonomi difokuskan pada perubahan pendapatan masyarakat setelah kegiatan Coremap dilaksanakan selama sekitar empat tahun. Pembahasan tidak hanya dibatasi pada pendapatan secara keseluruhan, akan tetapi juga pendapatan dari kegiatan kenelayanan, termasuk pendapatan pada setiap musim gelombang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan, antara lain berbagai program

pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu pokok bahasan pada bagian ini. Untuk mengetahui manfaat ekonomi Coremap secara lebih dalam, juga dianalisis perubahan pendapatan penduduk yang terlibat dalam berbagai pokmas program tersebut.

### 3.1. MANFAAT SOSIAL

Pada BAB I telah dikemukakan bahwa salah satu tujuan dari Coremap II adalah untuk mengurangi kemiskinan di kalangan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kondisi ekonomi. Pemberian *seed fund*, yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM), untuk pengembangan usaha ekonomi produktif merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kondisi ekonomi yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan pemberian *village grant* adalah kegiatan yang tidak terkait langsung dengan upaya tersebut.

Selain manfaat ekonomi, kedua upaya tersebut diharapkan juga memberi manfaat lain dalam kehidupan masyarakat di lokasi Coremap, di antaranya dari sisi sosial. Kegiatan pembangunan yang bersumber dari *village grant*, misalnya, diharapkan dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, misalnya pembangunan sarana dan prasarana kebersihan seperti bak sampah dan tempat mandi cuci kakus (MCK) dapat mendukung terciptanya perilaku hidup sehat. Hal yang sama juga diharapkan dari pemberian *seed fund* yang digunakan untuk usaha ekonomi produktif. *Seed fund* yang pengucurannya dilakukan melalui kelompok diharapkan dapat mendorong penerimanya melakukan kerjasama dalam kelompok untuk menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif.

Dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan Coremap memberikan manfaat dan sekaligus menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan

sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan perpecahan dalam masyarakat di lokasi Coremap, yang antara lain timbul akibat adanya kecemburuan sosial di antara mereka yang terlibat dan yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut. Sub-bab ini membahas manfaat sosial yang diperoleh masyarakat dari pemberian kedua jenis bantuan Coremap tersebut, baik dalam lingkup yang kecil, yaitu individu dan rumah tangga maupun dalam lingkup yang lebih besar, yaitu masyarakat di lokasi Coremap pada umumnya. Selain itu, dampak negatif pelaksanaan Coremap bagi kehidupan sosial masyarakat juga dibahas dalam bagian ini.

### ***Kegiatan Village Grant***

*Village grant* adalah skema bantuan dari Coremap berupa pemberian dana untuk pembangunan desa/kelurahan lokasi Coremap. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, antara lain pembangunan sarana dan prasarana fisik, konservasi dan rehabilitasi, dan pengembangan masyarakat. Seperti telah dikemukakan pada BAB II, sarana dan prasarana fisik yang dibangun menggunakan dana bantuan tersebut antara lain jalan, dermaga serta bak penampungan air. Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan di antaranya berupa pembangunan Daerah Perlindungan Laut (DPL), transplantasi karang, dan pembentukan peraturan desa. Selanjutnya, kegiatan pengembangan masyarakat meliputi pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat seperti pengolahan serta pemeliharaan ikan, termasuk ikan hias karang (wawancara dengan salah seorang pengelola Coremap Kabupaten Pangkep). Semua kegiatan yang dibiayai menggunakan *village grant* ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat di lokasi Coremap.

### ***Desa Mattiro Bombang***

Desa Mattiro Bombang memperoleh *village grant* sebanyak dua kali, yaitu tahun 2007 dan 2008. Penggunaan *village grant* serta mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut telah

dikemukakan dalam Bab II. Berdasarkan fakta yang dikemukakan dalam bab tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan desa secara umum yang dibiayai menggunakan dana *village grant*. Dana tersebut hanya digunakan untuk keperluan kegiatan Coremap. Sebaliknya, pembangunan fisik desa lebih banyak dilakukan dengan dana dari berbagai program pembangunan lainnya, khususnya PNPM, yaitu 4 unit sarana mandi cuci kakus (MCK) di Pulau Sabangko pada tahun 2006, dermaga di Pulau Salemo di tahun 2007, serta tanggul pada tahun 2008 dan 2009 (wawancara dengan pengurus salah satu program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Mattiro Bombang). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan masyarakat di Desa Mattiro Bombang, terutama yang tidak terlibat dalam aktivitas Coremap berpandangan bahwa kegiatan Coremap tidak memberikan manfaat (sosial) bagi masyarakat. Kutipan wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat yang juga pengurus salah satu program pembangunan selain Coremap berikut ini memperlihatkan kenyataan tersebut.

Masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan dari Coremap karena terbatas pada kegiatan melaut. Yang tahu hanya orang-orang di sekitar *info center*, yang tahu Cuma pengurus Coremap. (wawancara dengan Ibu Hj)

Penelitian ini mendapatkan adanya potensi konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat Desa Mattiro Bombang, khususnya di Pulau Salemo. Hal ini antara lain karena "pembangunan" yang dilaksanakan Coremap tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Hanya mereka yang terlibat kegiatan Coremap yang mengetahui kegiatan program tersebut. Sebagai contoh, tidak semua nelayan mengetahui pemasangan rumpon, sehingga tidak mengherankan jika muncul pandangan bahwa pengadaan "tempat tinggal" ikan tersebut terbatas hanya untuk anggota Coremap. Salah seorang nelayan yang diwawancarai dalam penelitian ini mengungkapkannya dalam petikan wawancara berikut.

Katanya Coremap buat rumpon, tapi kami ndak tau. Di mana dipasangnya kami juga ndak tau. Cuma mereka (*anggota*



*Coremap*) saja yang tau, kami ndak dikasih tau, ndak ada tandanya, sudah hanyut barangkali. Jadi kami cari ikan di tempat kami biasa cari saja. Apa-apa yang dibuat Coremap itu. Cuma pengurusnya dan mereka-mereka (*yang terlibat dalam pokmas Coremap*) saja yang tau. (wawancara dengan Bapak Ab)

Munculnya dua kelompok masyarakat yang berbeda (terlibat vs tidak terlibat dalam kegiatan Coremap) setelah pelaksanaan program tersebut tidak hanya terkait dengan kegiatan produksi. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan untuk pengawasan terumbu karang juga menjadi isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Hasil FGD dengan kelompok nelayan yang tinggal jauh<sup>5</sup> dari lokasi *info center* di Pulau Salemo memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam berbagai kegiatan Coremap hanya terbatas pada masyarakat yang tinggal di sekitar *info center* dan yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pengurus Coremap. Salah seorang anggota FGD mengemukakan sebagai berikut, "... kalau mau tau kegiatan Coremap, tanya saja sama yang dekat-dekat info center sana, kami di sini ndak tau".

Sampai saat penelitian ini dilaksanakan belum ada konflik yang muncul sebagai ungkapan kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Coremap. Secara umum kehidupan dan hubungan sosial masyarakat berjalan seperti sebelum Coremap dilaksanakan. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena manfaat (ekonomi) yang dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan Coremap tidak terlalu mencolok (untuk tidak mengatakan tidak ada manfaat ekonomi program tersebut). Jika kegiatan Coremap dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka yang terlibat secara mencolok,

---

<sup>5</sup> Sesungguhnya Pulau Salemo tidak terlalu luas dan dapat dikelilingi dengan berjalan kaki dalam waktu sekitar setengah jam. Namun masyarakat yang tinggal di bagian salah satu ujung pulau merasa bahwa jarak ujung pulau lainnya jauh dari kediaman mereka. Karena itu, *info centre* yang terletak di salah satu ujung pulau dianggap jauh oleh mereka yang tinggal di ujung yang berseberangan.

maka tidak tertutup kemungkinan kecemburuan di antara anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan Coremap akan muncul dalam bentuk konflik terbuka. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi agar konflik di antara kelompok masyarakat tidak muncul ke permukaan. Salah satu di upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan cakupan anggota masyarakat yang lebih luas. Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi mereka yang tinggal di sekitar *info center*, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Mattiro Bombang, termasuk Pulau Salemo yang mempunyai penduduk terbanyak.

### *Kelurahan Pundata Baji*

Berbeda dengan Desa Mattiro Bombang, *village grant* yang dikucurkan ke Kelurahan Pundata Baji digunakan untuk kegiatan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Kegiatan pembangunan yang dilakukan menggunakan *village grant* juga telah dikemukakan pada Bab II. Kecuali pembuatan pagar kantor kelurahan, semua kegiatan yang didanai dengan *village grant* dilaksanakan di wilayah pesisir di Kelurahan Pundata Baji. Hal ini dapat dimaklumi karena pelaksanaan kegiatan Coremap lebih difokuskan di wilayah pesisir yang mayoritas penduduknya melakukan kegiatan ekonomi di sektor perikanan tangkap.

Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merupakan permintaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini kebutuhan air bersih (tawar) dipenuhi dengan cara membeli dari PDAM Kabupaten Kabupaten Pangkep yang ditampung di satu tangki penampung yang terletak di wilayah pesisir. Air yang ditampung di tangki tersebut dibeli oleh salah seorang penduduk yang kemudian dijual kembali dalam ukuran derigen. Dengan adanya penambahan enam bak penampung baru yang pengadaannya menggunakan dana bantuan Coremap, penyediaan air bersih semakin merata di sepanjang wilayah pesisir. Untuk 4 bak penampung yang baru, tanggung jawab pembelian air dari PDAM terutama diberikan kepada penduduk yang rumahnya paling

dekat dengan lokasi bak penampung dan kemudian masyarakat membeli air kepada pemilik rumah tersebut<sup>6</sup>. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh air bersih di tempat yang tidak jauh dari rumah mereka.

Hal yang sama juga dirasakan pada pembangunan MCK. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi MCK, yang memungkinkan mereka untuk tidak buang air besar di laut, sehingga memberi manfaat dari berbagai aspek. Dari sisi sosial dan kesehatan, pembangunan MCK memungkinkan masyarakat mempraktekkan perilaku hidup sehat dengan tidak membuang kotoran di sembarang tempat, termasuk di laut. Selain itu, kebersihan lingkungan, khususnya dari kotoran manusia juga lebih terjaga, sehingga mendukung untuk terciptanya masyarakat yang sehat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, manfaat kegiatan Coremap dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya penduduk yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Coremap, mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program tersebut juga memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang didanai dari *village grant*.

Namun sayangnya, beberapa bulan sebelum penelitian dilaksanakan sarana yang dibangun melalui *village grant*, khususnya sarana MCK dan bak penampung air tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini karena pihak PDAM tidak lagi bersedia mengantarkan air ke lokasi jika tidak dibeli sebanyak satu tangki. Padahal, keempat bak penampung air secara keseluruhan tidak mampu memuat satu tangki air. Akibatnya, tidak ada lagi pengisian air pada bak-bak penampung yang penyediaannya dari bantuan Coremap. Ketiadaan air selanjutnya berimplikasi pada tidak dapat digunakannya sarana MCK. Akibatnya, bak penampung air dibiarkan kosong dan sarana MCK juga tidak dapat difungsikan.

---

<sup>6</sup> Harga 1 tangki air sebesar Rp. 110.000,- dan jika dijual dengan ukuran derigen menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- - Rp. 30.000,- (wawancara dengan salah seorang ibu penerima bantuan dari Coremap).

Secara umum di kedua lokasi penelitian, manfaat sosial yang dirasakan dari keberadaan Coremap adalah perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Perubahan perilaku yang terjadi meliputi dua hal, baik untuk diri sendiri maupun untuk tindakan yang dilakukan oleh orang/pihak lain. Perilaku yang menyangkut diri sendiri antara lain tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang merusak terumbu karang, sedangkan yang menyangkut orang/pihak lain adalah mengawasi tindak pengrusakan yang dilakukan oleh orang/pihak lain tersebut.

Perubahan perilaku seperti di atas terlihat jelas di kalangan masyarakat di Desa Mattiro Bombang. Semua nelayan, terutama yang berpartisipasi dalam kegiatan Coremap melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku pengrusakan terumbu karang. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan patroli, akan tetapi juga ketika mereka sedang melakukan menangkap ikan. Jika memungkinkan pelaku dikejar oleh nelayan, namun jika mereka tidak bisa mengejar pelaku, kejadian yang ditemui dilaporkan kepada anggota pokmas pengawasan Coremap.

Perubahan perilaku di atas dimungkinkan karena adanya pengetahuan yang memadai mengenai fungsi dan manfaat sumber daya alam tersebut bagi kehidupan manusia dan juga ekosistem secara keseluruhan. Pengetahuan yang dimiliki meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Kesadaran yang tinggi mendorong terjadinya perubahan perilaku ke arah yang positif terhadap pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya.

### ***Kegiatan LKM (UEP)***

LKM (Lembaga Keuangan Mikro) merupakan lembaga yang dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan Coremap, khususnya dalam pengelolaan *seed fund*. *Seed fund* adalah dana bantuan yang berasal dari Coremap dan diperuntukkan bagi pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP). Penerima *seed fund* adalah penduduk di lokasi Coremap yang berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut dan menjadi anggota salah satu kelompok masyarakat (pokmas) Coremap. Keikutsertaan

dalam pokmas mendorong anggotanya untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk usaha ekonomi produktif secara bersama-sama.

Dalam prakteknya, manfaat sosial dari kegiatan LKM/UEP tidak selalu didapatkan oleh masyarakat di lokasi Coremap. Hal ini karena pada umumnya bantuan *seed fund* yang diperoleh anggota pokmas digunakan untuk melaksanakan kegiatan UEP yang bersifat individual, seperti yang ditemui di Desa Mattiro Bombang. Di desa ini tidak ada kegiatan UEP yang dilakukan secara berkelompok, sehingga semangat bekerjasama dalam melaksanakan usaha ekonomi sulit untuk diwujudkan.

Bantuan untuk UEP yang dikelola melalui LKM bahkan cenderung menimbulkan dampak negatif secara sosial bagi masyarakat di Desa Mattiro Bombang. Sebagian penerima bantuan *seed fund* beranggapan bahwa dana yang mereka terima adalah pemberian dari pemerintah, bukan hutang yang cicilannya akan dipinjamkan lagi kepada anggota pokmas lainnya. Oleh karena itu, sebagian tidak melunasi cicilan bantuan *seed fund*, sehingga menghambat penggulirannya kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang narasumber pengelola usaha simpan pinjam untuk usaha ekonomi produktif dari salah satu program pemerintah berikut ini, "*mereka anggap itu uang mati, uang pemberian dari pemerintah, jadi tidak perlu dikembalikan*". Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberian *seed fund* menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu menumbuhkan sifat sebagai "orang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah" walaupun dari awal mengetahui bahwa bantuan tersebut merupakan hutang yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kenyataan yang berbeda ditemukan di Kelurahan Pundata Baji. Sebagian bantuan *seed fund* di kelurahan ini diberikan kepada anggota pokmas Coremap secara perorangan<sup>7</sup>, dengan memberi prioritas pada mereka yang selama ini dikenal membayar cicilan hutang dengan lancar sampai

---

<sup>7</sup> Jumlah pinjaman berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

lunas. Selain itu, bantuan *seed fund* juga diberikan kepada beberapa pengusaha di Kelurahan Pundata Baji, namun dana tersebut dipinjamkan lagi kepada pihak lain secara perorangan<sup>8</sup>. Dalam kasus ini pengusaha bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman *seed fund* kepada LKM, sedangkan individu-individu yang meminjam membayar cicilan hutang kepadanya.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya hubungan (sosial) yang terjadi antara anggota masyarakat yang memperoleh bantuan *seed fund* dan pengusaha yang menjadi pejamin pinjaman kepada LKM. Meskipun tidak tertutup kemungkinan pengusaha juga memperoleh keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut, namun tanpa keinginannya untuk mengambilalih tanggung jawab sebagai peminjam kepada pihak LPM, anggota masyarakat lainnya tidak bisa memperoleh bantuan untuk kegiatan UEP dari Coremap.

### 3.2. MANFAAT EKONOMI

Manfaat ekonomi dari kegiatan Coremap dapat dilihat dan diukur dari perubahan pendapatan masyarakat di lokasi implementasi Coremap. Pendapatan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Perubahan pendapatan dalam suatu kurun waktu tertentu dapat menunjukkan keberhasilan suatu program yang diimplementasikan di suatu daerah terkait dengan perluasan kesempatan kerja serta alternatif-alternatif mata pencaharian yang dikembangkan di daerah tersebut.

Bagian ini menggambarkan tentang pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupbabin dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, yang merupakan dua daerah implementasi Coremap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta perubahan yang terjadi dari tahun 2006 (T0), 2008 (T1) dan 2009 (T2).

---

<sup>8</sup> Pinjaman diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, misalnya sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-.

Analisis tentang perubahan pendapatan rumah tangga ini dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu 1) secara umum mencakup seluruh rumah tangga sampel, 2) khusus untuk rumah tangga nelayan dalam sampel terpilih dan 3) rumah tangga anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Coremap dan non-anggota Pokmas.

Ukuran-ukuran pendapatan yang digunakan mencakup statistik pendapatan rumah tangga (pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata, median pendapatan, serta pendapatan maksimum dan minimum), dari semua jenis pekerjaan yang dilakukan anggotanya. Secara lebih khusus, statistik pendapatan rumah tangga nelayan melihat pendapatan dari kegiatan kenelayanan untuk setiap musim, yaitu gelombang kuat, musim pancaroba dan musim gelombang lemah.

### **3.2.1. Desa Mattiro Bombang**

Sebagai desa yang wilayahnya terdiri dari beberapa pulau (desa kepulauan), mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Desa Mattiro Bombang bersumber dari kegiatan kenelayanan. Beberapa kegiatan kenelayanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama di desa ini adalah nelayan (penangkap) kepiting, ikan tenggiri dan ikan gamasi (Noveria, dkk., 2008). Seiring dengan berjalannya waktu peranan kegiatan kenelayanan sebagai mata pencaharian utama rumah tangga di desa ini semakin berkurang. Pada tahun 2006, 95 persen rumah tangga dalam sampel survei di desa ini mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Persentase ini berkurang menjadi 78 persen pada tahun 2009 (Survei Rumah Tangga di Desa Mattiro Bombang, 2006, 2008 dan 2009). Sumber mata pencaharian penduduk lainnya di luar kegiatan kenelayanan adalah perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri, dan transportasi.

#### ***Pendapatan Rumah Tangga***

Mencermati kondisi tahun 2006-2009 serta perubahannya, secara umum terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, yang diwakili oleh sampel

terpilih dalam penelitian. Pendapatan rumah tangga per bulan meningkat rata-rata sebesar 11,2 persen sedangkan pendapatan per kapita meningkat rata-rata sebesar 13,3 persen (Tabel 3.1). Jika dilihat fluktuasi perubahan, antara tahun 2006-2008 terjadi peningkatan pendapatan sedangkan antara tahun 2008-2009 terjadi penurunan, meskipun penurunan ini tidak sebesar peningkatan yang terjadi antara tahun 2006-2008. Dengan demikian, kecenderungan umum antara tahun 2006-2009 adalah terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang. Statistik pendapatan yang menunjukkan peningkatan antara tahun 2008-2009 hanya untuk pendapatan minimum. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi rumah tangga yang KRT-nya sama sekali tidak memiliki pendapatan (masih dibiayai oleh orang tua) (lihat Noveria, dkk, 2008).



Tabel 3.1  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan  
 Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009.

Statistik pendapatan per bulan	Besar pendapatan per bulan (Rp.)		Perubahan pendapatan (%)				Perubahan per tahun, 2006-2009 (%)
	2006	2008	2009	2006-2008	2008-2009	2006-2009	
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	547.250	958.751	752.197	67,03	- 21,54	37,45	11,19
Rata-rata pendapatan per kapita	116.963	195.359	170.343	67,03	-12,81	45,64	13,35
Median	402.383	734.167	641.667	-	-	-	-
Minimum	30.167	0	50.000	-	-	-	-
Maksimum	3.333.333	9.650.000	3.150.000	-	-	-	-
N	100	122	122	-	-	-	-

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Perubahan (kenaikan dan penurunan) pendapatan rumah tangga ini dapat terkait dengan perubahan mata pencaharian penduduk. Jika dilihat kondisi tahun 2006, 2008 dan 2009, pada tahun 2006 mata pencaharian di luar kegiatan kenelayanan (perikanan tangkap) hanya di bidang jasa kemasyarakatan. Pada saat itu, perikanan tangkap masih merupakan sektor yang memberikan pendapatan tertinggi untuk rumah tangga di desa ini. Perubahan terjadi pada tahun 2008, yaitu adanya perluasan kesempatan kerja di sektor perdagangan, industri dan transportasi. Tiga (3) sektor utama yang memberi pendapatan tinggi pada tahun tersebut adalah perdagangan, diikuti perikanan tangkap dan transportasi, yang merupakan transportasi laut (angkutan penumpang, barang dan hasil tangkapan nelayan). Pada tahun 2009 pekerjaan yang memberikan pendapatan tertinggi adalah sektor jasa kemasyarakatan diikuti perikanan tangkap dan perdagangan. Sektor industri, yang berkembang adalah industri pengupasan kepiting (*mini plan*). Meskipun sektor ini tetap bertahan pada tahun 2009, tetapi tidak memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan sektor jasa dan perikanan tangkap (lihat Tabel 3.2).

Pada tahun 2009 sektor transportasi tidak lagi menjadi sumber mata pencaharian di antara rumah tangga sampel dalam survei di desa ini (Tabel 3.2). Muncul dan hilangnya sektor transportasi sebagai sumber mata pencaharian penduduk di Desa Mattiro Bombang kemungkinan terkait persaingan dengan pengusaha-pengusaha transportasi laut dari desa/wilayah lainnya. Sebagai desa yang wilayahnya terbuka dan dikelilingi laut, persaingan dalam usaha transportasi laut juga sangat terbuka, sehingga pengusaha yang kurang kuat akan terlindas oleh pengusaha kuat, yang mempunyai modal dan sarana angkutan yang lebih baik dan lebih besar. Sektor perikanan tangkap dan jasa kemasyarakatan, karenanya, merupakan sektor pekerjaan terpenting untuk masyarakat Desa Mattiro Bombang, dilihat dari keberlangsungannya dalam tiga (3) tahun meskipun pendapatan dari sektor ini juga berfluktuasi.

Dilihat dari pendapatan minimum rumah tangga sampel, sektor perikanan tangkap memberikan pendapatan minimum terendah pada tahun 2006 dan 2008. Kondisi yang berbeda ditemukan pada tahun 2009, yaitu sektor jasa kemasyarakatan memberikan pendapatan minimum terkecil. Untuk pendapatan maksimum, sektor perikanan tangkap memberikan pendapatan maksimum tertinggi dalam tiga (3) tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009). Fakta ini lebih memperkuat pentingnya sektor perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk di Desa Mattiro Bombang, meskipun pendapatan rumah tangga dari sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Keadaan ini jelas sangat berkaitan dengan kondisi geografis wilayah Desa Mattiro Bombang yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi wilayah laut, sehingga sumber daya laut sangat tersedia untuk dieksploitasi. Selain itu, fluktuasi pendapatan dari sektor ini juga sangat tergantung pada kondisi iklim, yang (berdasarkan hasil wawancara mendalam) juga menunjukkan gejala pergeseran 'musim'.

Tabel 3.2

Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan per Bulan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009.

Lapangan pekerjaan utama KRT	Pendapatan rata-rata per bulan (Rp.)			Pendapatan minimum per bulan (Rp.)			Pendapatan maksimum per bulan (Rp.)		
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009
Perikanan tangkap	555.504	984.414	760.030	30.167	21.667	91.000	3.333.333	9.650.000	3.150.000
Perdagangan	-	1.804.400	502.417	-	212.000	86.667	-	5.210.000	1.666.667
Jasa kemasyarakatan	344.000	491.666	935.438	280.000	275.000	50.000	472.000	700.000	3.000.000
Industri	-	560.000	304.167	-	560.000	304.167	-	560.000	304.167
Transportasi	-	693.333	-	-	100.000	-	-	1.500.000	-

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Kenaikan pendapatan rata-rata per kapita dapat menjadi indikator berkurangnya kemiskinan. Dengan menggunakan referensi di tingkat provinsi, garis kemiskinan (Rp./kapita/bulan) di perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 115.788,- pada tahun 2007 dan Rp. 127.938,- pada tahun 2008 (BPS, 2009). Mengacu pada garis kemiskinan tersebut, terlihat bahwa dari rata-rata pendapatan per kapitanya, penduduk di Desa Mattiro Bombang tidak masuk dalam kelompok penduduk miskin. Namun demikian, jika dilihat dari pendapatan rata-rata rumah tangga terendah, yaitu antara Rp. 30.000,- - Rp. 50.000,-, masih ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika diasumsikan rata-rata satu rumah tangga beranggotakan lima (5) orang, garis kemiskinan di tingkat rumah tangga di perdesaan Sulawesi Selatan adalah kira-kira Rp. 578.940,- pada tahun 2007 dan Rp. 639.690,- pada tahun 2008. Dari data pada Tabel 3.3. terlihat bahwa paling sedikit pada tahun 2008 ada sekitar 34,4 persen rumah tangga miskin (yang berpendapatan di bawah Rp. 500.000,-/bulan) di Desa Mattiro Bombang.

Kenaikan pendapatan juga dapat terkait dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang berhubungan dengan harga kebutuhan hidup. Untuk rumah tangga yang bermata pencaharian dari kegiatan kenelayan, kenaikan pendapatan dapat terkait dengan kenaikan harga hasil laut seperti ikan. Sebagai contoh, harga ikan Bandeng dan Cakalang merupakan salah satu penyumbang inflasi di atas 0,01 persen untuk provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Desember 2009 (Ishak, 2010). Ikan Cakalang merupakan jenis ikan yang umum menjadi tangkapan nelayan di wilayah ini.

Data pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan pendapatan terendah (< Rp. 500.000,-) menurun antara tahun 2006-2009, meskipun pada tahun 2009 proporsinya lebih besar daripada tahun 2008. Keadaan ini sejalan dengan kondisi pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita yang meskipun secara umum meningkat antara tahun 2006-2009, tetapi pendapatan tahun 2009 lebih rendah dari tahun 2008. Keadaan ini juga dapat terkait dengan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2009. Perekonomian daerah Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2009 diperkirakan tumbuh sebesar 6,85 persen. Pada triwulan yang sama tahun 2008, pertumbuhannya lebih tinggi, yaitu sebesar 8,13 persen (DIBI, 2009). Pertumbuhan ekonomi di tingkat makro ini dapat saja berdampak terhadap pendapatan di tingkat rumah tangga, yang ditunjukkan dengan penurunan pendapatan rumah tangga antara tahun 2008-2009. Kenaikan yang linier hanya terjadi pada rumah tangga dengan kelompok pendapatan antara 1-1,5 juta rupiah. Untuk rumah tangga dalam kelompok pendapatan di atas 1,5 juta rupiah, proporsinya menurun secara linier antara tahun 2006-2009 (Tabel 3.3).

Tabel 3.3  
 Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata per bulan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2006, 2008, dan 2009 (%).

Kelompok pendapatan per bulan (Rp.)	Jumlah (%)		
	2006	2008	2009
< 500.000	61,0	34,4	39,3
500.000 – 999.999	28,0	32,0	34,4
1.000.000 – 1.499.999	7,0	18,0	18,9
1.500.000 – 1.999.999	2,0	9,8	4,9
2.000.000 – 2.499.999	1,0	0,8	0,0
2.500.000 – 2.999.999	0,0	1,6	0,8
> 3.000.000	1,0	3,3	1,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	100	122	122

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

### *Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan*

Pada tahun 2006, kurang lebih 95 persen rumah tangga di Desa Mattiro Bombang memiliki pendapatan dari kegiatan kenelayanan yang mencakup perikanan tangkap. Jika dilihat dari mata pencaharian utama

kepala rumah tangga/KRT, proporsi ini turun menjadi sekitar 88 persen pada tahun 2008 dan 78 persen pada tahun 2009 (data hasil survei tahun 2006, 2008 dan 2009, memperlihatkan bahwa). Keadaan ini menunjukkan semakin kurang pentingnya kegiatan kenelayanan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga di desa ini.

Pola pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan ini juga mengikuti pola pendapatan rumah tangga secara umum. Antara tahun 2006-2008, terjadi peningkatan pendapatan, tetapi antara tahun 2008-2009 terjadi penurunan pendapatan yang ditunjukkan oleh statistik rata-rata pendapatan rumah tangga, rata-rata pendapatan per kapita, median pendapatan dan pendapatan maksimum. Kecenderungan agak berbeda ditemukan pada statistik pendapatan minimum, yaitu antara tahun 2006-2008 terjadi penurunan, sedangkan antara tahun 2008-2009 terjadi peningkatan (Tabel 3.4).

Meskipun terjadi penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan antara tahun 2008-2009, tetapi pendapatan pada tahun 2009 tetap masih lebih tinggi dari pada pendapatan pada tahun 2006. Secara umum persentase kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga per tahun antara tahun 2006-2009 adalah sebesar 17,9 persen, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita meningkat sebesar 19 persen per tahun. Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga yang terjadi antara tahun 2006-2008 mencapai hampir 100 persen (dua kali lipat), sedangkan untuk rata-rata pendapatan per kapita mencapai 85 persen (Tabel 3.4). Meskipun mata pencaharian dari kegiatan kenelayanan menjadi kurang penting (dilihat dari proporsi rumah tangga yang memiliki kegiatan utama di sektor ini), tetapi masih merupakan sumber mata pencaharian yang penting dilihat dari pendapatan yang terus meningkat dari kegiatan kenelayanan ini.

Tabel 3.4  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Mattiro Bombang,  
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009.

Statistik pendapatan per bulan	Besar pendapatan per bulan (Rp.)			Perubahan pendapatan (%)			Perubahan per tahun, 2006-2009 (%)
	2006	2008	2009	2006-2008	2008-2009	2006-2009	
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	423.989	844.297	694.158	99,13	-17,78	63,72	17,86
Rata-rata pendapatan per kapita	92.337	171.009	156.368	85,12	-8,56	69,27	19,18
Median	333.333	683.000	550.000	-	-	-	-
Minimum	34.833	16.667	37.500	-	-	-	-
Maksimum	1.910.000	4.650.000	3.150.000	-	-	-	-
N	95	107	95	-	-	-	-

Catatan: Kasus 'pencarian' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.



Kontribusi pendapatan dari kegiatan kenelayan terhadap total pendapatan rumah tangga juga cukup bes<sup>9</sup> dan umumnya menunjukkan proporsi yang terus meningkat antara tahun 2006-2009. Pada tahun 2009 kontribusi kegiatan kenelayan terhadap pendapatan total rumah tangga mencapai lebih dari 90 persen (Tabel 3.5). Ini menunjukkan bertambah pentingnya kegiatan kenelayan dalam menopang kehidupan rumah tangga di daerah ini yang mungkin disebabkan karena membaiknya sarana/prasarana yang digunakan penduduk untuk melaut atau membaiknya hasil tangkapan mereka karena kondisi alam/laut. Jika dikaitkan dengan fakta berkurangnya persentase rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai nelayan selama kurun waktu 2006-2009, kondisi ini dapat menunjukkan berkurangnya persaingan rumah tangga dalam mengeksploitasi sumberdaya laut (SDL), sehingga meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya dari kegiatan kenelayan.

Di sisi lain, kondisi ini juga dapat menjadi indikasi bertambahnya diversifikasi mata pencaharian penduduk di Desa Mattiro Bombang, dengan bertambahnya proporsi rumah tangga yang bermata pencaharian utama di luar kegiatan kenelayan. Dengan demikian, secara umum ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan kenelayan menjadi semakin berkurang, meskipun pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan ini meningkat. Keadaan ini juga dapat mengindikasikan kerentanan ekonomi masyarakat wilayah kepulauan (Desa Mattiro Bombang) terhadap perubahan iklim dan musim, yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesempatan penduduk dalam mengeksploitasi SDL serta kegiatan-kegiatan lainnya

---

<sup>9</sup> Pada tahun 2008, ada rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai pendapatan dalam bulan perhitungan/pengumpulan data (lihat Tabel 3.1). Rumah tangga ini merupakan rumah tangga yang tidak memiliki sumber pendapatan dari kegiatan kenelayan, sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki kegiatan kenelayan, masih memiliki pendapatan meskipun sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 16.667,-/bulan (lihat Tabel 3.6).

yang terkait dengan pengolahan SDL, karena kontribusi kegiatan kenelayanan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan cukup tinggi.

Tabel 3.5  
Kontribusi Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008 dan 2009 (%).

Statistik pendapatan per bulan	Kontribusi pendapatan dari kegiatan kenelayanan terhadap pendapatan total rumah tangga		
	2006	2008	2009
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	77,5	88,1	92,3
Rata-rata pendapatan per kapita	78,9	87,5	91,8
Maksimum	57,3	48,2	100,0
N	95	107	95

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Kerentanan ekonomi penduduk wilayah kepulauan di Desa Mattiro Bombang juga terlihat dari pola pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan berdasarkan musim. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa tidak ada pola tetap yang menunjukkan bahwa pada musim tertentu nelayan selalu mendapatkan hasil yang tinggi (dilihat dari pendapatan rata-rata rumah tangga). Pada tahun 2006, hasil tertinggi didapat pada musim gelombang lemah. Pada tahun 2008, hasil tertinggi nelayan didapat pada musim gelombang kuat sedangkan pada tahun 2009 pada musim gelombang lemah. Keadaan ini mengindikasikan adanya perubahan pola ketersediaan sumberdaya laut (ikan) yang tidak hanya berdasarkan musim, di sekitar wilayah tangkap nelayan. Demikian juga jika dilihat dari pendapatan tertinggi, tidak terlihat pola pendapatan yang tetap berdasarkan musim, dalam 3 tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009). Jika dilihat dari pendapatan minimum, pada musim gelombang kuat

lebih cenderung nelayan tidak mempunyai penghasilan, karena selama 3 tahun pengamatan, pendapatan terendah dari kegiatan kenelayan adalah nol (0) rupiah. Ini kemungkinan mewakili kondisi nelayan 'miskin' yang kemungkinan besar tidak memiliki sarana dan peralatan tangkap yang baik, yang dapat mengatasi kondisi buruk pada musim ombak besar. Untuk nelayan dengan sarana peralatan tangkap yang baik, ditunjukkan oleh besarnya pendapatan (maksimum), pada setiap musim masih ada pendapatan yang didapat, meskipun jumlahnya bervariasi berdasarkan musim dan tahun.

Untuk setiap tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009) dan musim, terlihat bahwa sebagian besar (lebih dari 50 persen) rumah tangga berpendapatan di bawah Rp. 1.000.000,- (Tabel 3.7). Pada kelompok rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi, yaitu di atas 2 juta rupiah (dari kegiatan kenelayan), kondisi tahun 2006 menunjukkan bahwa pendapatan pada saat gelombang lemah lebih baik dibandingkan musim gelombang kuat dan musim pancaroba. Untuk tahun 2008, kondisi musim gelombang kuat lebih baik dari dua musim lainnya, sedangkan untuk tahun 2009, kondisi pada musim gelombang lemah lebih baik dibandingkan dua musim lainnya. Keadaan ini sekali lagi mendukung asumsi bahwa tidak ada pola pendapatan yang tetap berdasarkan musim setiap tahun. Keadaan ini dapat saja terpengaruh oleh kondisi iklim dan musim yang sudah menunjukkan gejala perubahan. Data distribusi pendapatan pada Tabel 3.7 juga menunjukkan bahwa pada musim gelombang lemah semua kelompok nelayan (berdasarkan tingkatan pendapatannya) dapat pergi melaut, sehingga kategori pendapatan lebih bervariasi dari pendapatan terendah (< Rp. 500.000,-) sampai tertinggi (> Rp. 3.000.000,-).

Tabel 3.6  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan per Bulan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten  
 Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2006, 2008 dan 2009 (Rp.).

Statistik pendapatan per bulan	Musim dan besar pendapatan (Rp.)									
	Gelombang kuat			Pancaroba			Gelombang lemah			
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009	
Rata-rata rumah tangga	486.958	1.023.069	535.800	343.219	854.186	581.858	539.104	885.396	964.816	
Median	400.000	600.000	400.000	250.000	687.500	450.000	335.000	750.000	750.000	
Minimum rumah tangga	0	0	0	30.000	0	0	7.000	0	80.000	
Maksimum rumah tangga	2.550.000	8.600.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	5.850.000	6.000.000	

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Tabel 3.7

Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan per Bulan dari Kegiatan Kenyelanaan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2006, 2008 dan 2009 (%).

Besar pendapatan per bulan	Musim dan besar pendapatan (Rp.)													
	Gelombang kuat						Pancaroba						Gelombang lemah	
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009		
< 500.000	67,7	38,6	64,2	85,4	34,8	58,9	61,4	31,0	38,9					
500.000 – 999.999	20,8	24,1	18,9	8,3	32,9	21,1	20,8	35,4	23,2					
1.000.000 – 1.499.999	7,3	13,9	10,5	4,2	17,7	17,9	9,4	20,3	15,8					
1.500.000 – 1.999.999	2,1	10,8	4,2	1,0	5,1	1,1	5,2	3,2	11,6					
2.000.000 – 2.499.999	1,0	6,3	2,1	1,0	4,4	-	1,0	5,1	4,2					
2.500.000 – 2.999.999	1,0	1,3	-	-	1,9	-	1,0	3,0	5,3					
> 3.000.000	-	3,5	-	-	3,1	1,1	1,0	1,9	1,1					
Jumlah	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
N	96	107	95	96	107	95	96	107	95	96	107	95		

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Salah satu kegiatan dalam Program Coremap yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga berbentuk usaha ekonomi produktif (UEP). UEP ini dilakukan secara berkelompok, dalam kelompok masyarakat (pokmas). Setiap pokmas yang dibentuk mendapat bantuan berupa pinjaman dana (bergulir) sebagai modal untuk pengembangan usaha ekonomi di masing-masing kelompoknya. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga anggota pokmas maupun perbedaan pendapatan antara rumah tangga anggota dan bukan anggota pokmas. Tabel 3.7 menunjukkan statistik pendapatan rumah tangga anggota dan bukan anggota pokmas.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum pendapatan rumah tangga penerima bantuan dana bergulir di Desa Mattiro Bombang lebih besar dibandingkan pendapatan rumah tangga bukan penerima dana bergulir (Tabel 3.8). Dari median pendapatan rumah tangga terlihat bahwa pada tahun 2009 sekitar 50 persen rumah tangga anggota pokmas memiliki pendapatan di atas Rp. 733.333,-, sedangkan untuk rumah tangga bukan anggota Pokmas sebanyak 50 persen berpendapatan di atas Rp. 600.000,-. Keadaan ini dapat menjadi indikasi keberhasilan dari program pemberian bantuan dana bergulir dalam Program Coremap, dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Tabel 3.8  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima dan Non-Penerima  
 Dana Bergulir Coremap, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten  
 Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2009.

Statistik pendapatan per bulan	Pendapatan penerima dana bergulir (Rp.)	Pendapatan bukan penerima dana bergulir (Rp.)	Pendapatan total rumah tangga (Rp.)
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	1.012.974	670.879	752.197
Rata-rata pendapatan per kapita	218.756	155.247	170.343
Median	733.333	600.000	641.666
Minimum	130.000	50.000	50.000
Maksimum	3.150.000	1.766.666	3.150.000
N	29	93	122

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

### 3.2.2. Kelurahan Pundata Baji

Kelurahan Pundata Baji yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu kelurahan dalam Kecamatan Labakkang. Sebagai daerah yang terletak di wilayah pesisir pantai barat Pulau Sulawesi, mata pencaharian utama penduduknya lebih bervariasi, mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya (khususnya udang dan ikan bandeng), dan jasa kemasyarakatan serta mata pencaharian lainnya yang tidak terlalu dominan yaitu perdagangan dan industri, dibandingkan dengan mata pencaharian utama penduduk di Desa Mattiro Bombang, yang merupakan wilayah kepulauan. Selain dari itu, penduduk di Kelurahan Pundata Baji juga ada yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan (Noveria dkk, 2008, Gambar 2.11). Berlawanan dengan kondisi di Desa Mattiro Bombang, antara tahun 2006-2008 terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan tangkap, tetapi untuk tahun 2009, proporsinya menurun kembali. Ini dapat disebabkan karena untuk masyarakat pesisir, kegiatan di bidang perikanan budidaya lebih umum dibandingkan dengan nelayan tangkap, yang dipengaruhi oleh kondisi iklim dan musim. Selain dari itu, juga disebabkan karena kondisi alam dan daerah pesisir sangat mendukung untuk usaha perikanan budidaya.

#### *Pendapatan Rumah Tangga*

Secara umum pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji pada periode waktu 2006-2009 mengalami peningkatan secara linier yang dapat dilihat dari statistik pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita. Pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 23,3 persen antara tahun 2006-2009, sedangkan pendapatan per kapita lebih besar peningkatannya, yaitu sebesar 38,6 persen. Peningkatan pendapatan rata-rata per tahun antara tahun 2006-2009 adalah sebesar 7,2 persen untuk pendapatan rumah tangga dan 11,5 persen untuk pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan juga lebih besar terjadi antara tahun 2008-2009 dibandingkan dengan kondisi tahun 2006-2008 (Tabel 3.9). Statistik pendapatan lainnya menunjukkan bahwa untuk median dan

minimum pendapatan terjadi penurunan antara tahun 2006-2008, tetapi kemudian terjadi peningkatan antara tahun 2008 dan 2009. Sebaliknya, untuk kelompok pendapatan maksimum, antara tahun 2006-2008 terjadi peningkatan, tetapi kemudian antara tahun 2008-2009 terjadi penurunan.

Secara umum, peningkatan pendapatan yang terjadi secara linier dapat diartikan sebagai terus meningkatnya kondisi ekonomi rumah dan tidak terjadi fluktuasi selama periode tahun 2006, 2008, dan 2009. Kenaikan pendapatan rumah tangga di kelurahan ini juga dapat terkait dengan kenaikan harga ikan, khususnya ikan bandeng yang banyak dibudidayakan masyarakat. Harga ikan Bandeng merupakan salah satu penyumbang inflasi di atas 0,01 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pada Bulan Desember 2009 (Ishak, 2010). Di antara rumah tangga sampel di Kelurahan Pundata Baji juga tidak ada yang sama sekali tidak memiliki pendapatan selama periode pengamatan. Pendapatan minimum rumah tangga selama periode 2006-2008 relatif cukup rendah, berkisar antara Rp. 41.667,- - Rp 71.667,-.

Pendapatan rumah tangga/individu dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Garis kemiskinan (Rp./kapita/bulan) di perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 149.439,- pada tahun 2007 dan meningkat menjadi Rp. 160.220,- pada tahun 2008 (BPS, 2009). Dari pendapatan rata-rata per kapita (Tabel 3.9) dapat diperkirakan bahwa selama tahun 2006, 2008, dan 2009 tidak ada penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan (termasuk penduduk miskin). Jika diperkirakan satu rumah tangga di perkotaan beranggotakan rata-rata 4 orang, maka garis kemiskinan di tingkat rumah tangga di perkotaan Sulawesi Selatan adalah Rp. 597.756,- pada tahun 2007 dan Rp. 640.880,- pada tahun 2008. Dari rata-rata pendapatan rumah tangga juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keluarga miskin di daerah penelitian selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2006 dan 2008 paling sedikit terdapat 25 persen rumah tangga miskin (berpendapatan di bawah Rp 500.000,-/bulan, berarti di bawah garis kemiskinan rumah tangga) di Kelurahan Pundata Baji (lihat Tabel 3.11).



Tabel 3.9  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan  
 Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009.

Statistik pendapatan per bulan	Besar pendapatan per bulan (Rp.)				Perubahan pendapatan (%)			Perubahan per tahun, 2006-2009 (%)
	2006	2008	2009	2006-2008	2008-2009	2006-2009		
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	1.109.653	1.168.727	1.367.753	5,32	17,03	23,26	7,22	
Rata-rata pendapatan per kapita	206.050	236.602	285.671	14,83	20,74	38,64	11,51	
Median	975.000	833.333	1.000.000	-	-	-	-	
Minimum	60.000	41.667	71.667	-	-	-	-	
Maksimum	4.796.667	8.070.000	6.033.333	-	-	-	-	
N	99	120	119	-	-	-	-	

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Untuk penduduk Kelurahan Pundata Baji, sektor industri dan perdagangan merupakan sektor terpenting dilihat dari tingkat pendapatan rumah tangga rata-rata yang bekerja di sektor tersebut selama tahun 2006-2008. Namun demikian, pada tahun 2009 terjadi perubahan/pergeseran, yaitu sektor jasa kemasyarakatan memiliki pendapatan rata-rata rumah tangga tertinggi<sup>10</sup> (Tabel 3.10). Sebagai daerah pesisir, kegiatan di bidang perikanan tangkap ternyata kurang penting dibandingkan sektor perikanan budidaya, karena pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan budidaya lebih besar dibandingkan perikanan tangkap. Ini terlihat dari pendapatan minimum dan maksimum rumah tangga yang bekerja di kedua sektor tersebut. Lapangan pekerjaan yang paling rendah pendapatannya di Kelurahan ini adalah di sektor pertanian tanaman pangan, yang terlihat dari rendahnya pendapatan rata-rata, pendapatan minimum maupun pendapatan maksimum rumah tangga dari sektor ini.

Secara umum, dengan melihat kondisi selama tiga (3) tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009) serta statistik pendapatan rumah tangga (rata-rata, minimum, dan maksimum) 4 (empat) sektor mata pencaharian terpenting untuk penduduk di Kelurahan Pundata Baji adalah industri, jasa kemasyarakatan, perdagangan, dan perikanan budidaya. Sektor transportasi yang pada tahun 2006 masih merupakan salah satu lapangan kerja yang memberi penghasilan bagi rumah tangga di kelurahan ini pada tahun 2009 sudah tidak lagi merupakan sumber mata pencaharian utama (Tabel 3.10). Ini mungkin disebabkan banyaknya persaingan yang tidak dapat diatasi oleh rumah tangga yang memiliki usaha transportasi di Kelurahan Pundata Baji dengan pengusaha transportasi (laut) dari wilayah lainnya. Analisis pendapatan rumah tangga pada Tabel 3.10 juga menunjukkan tidak ada pola pendapatan rumah tangga yang tetap menurut lapangan kerja utama (kepala rumah tangga). Ini dapat disebabkan karena umumnya pekerjaan yang dilakukan penduduk di Kelurahan Pundata Baji juga sangat tergantung pada musim seperti perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, industri dan perdagangan (yang juga tergantung hasil perikanan tangkap dan budidaya), serta transportasi (laut).

---

<sup>10</sup> Sektor lainnya yang terdiri dari sektor bangunan dan peternakan tidak dimasukkan dalam perkiraan karena jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan di sektor ini sangat kecil, yaitu satu (1) rumah tangga untuk sektor peternakan dan tiga (3) rumah tangga untuk sektor peternakan.

Tabel 3.10  
 Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008 dan 2009.

Lapangan pekerjaan utama KRT	Pendapatan rata-rata (Rp.)			Pendapatan maksimum (Rp.)			Pendapatan Minimum (Rp.)		
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009
Perikanan tangkap	974.226	929.292	988.820	191.667	212.500	160.000	2.116.667	2.138.333	3.833.333
Perikanan budidaya	1.216.513	1.090.530	1.238.137	155.833	41.667	71.667	4.796.667	7.100.000	6.033.333
Pertanian tanaman pangan	388.667	511.083	978.472	100.000	187.500	625.000	716.667	1.238.750	1.658.333
Industri	4.090.278	2.523.333	759.444	270.833	700.000	210.000	11.000.000	6.000.000	1.876.667
Perdagangan	1.194.764	1.176.042	1.157.500	284.000	240.000	130.000	3.240.000	2.521.667	2.600.000
Jasa kemasyarakatan	1.545.145	1.518.157	2.024.413	600.000	400.000	100.000	2.300.000	4.894.500	4.705.000
Transportasi	760.917	429.458	-	371.250	80.000	-	1.833.333	870.000	-
Lainnya	1.686.042	725.000	2.373.833	289.167	125.000	73.333	3.083.333	1.325.000	4.200.000

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Tabel 3.11. menunjukkan distribusi rumah tangga sampel terpilih menurut lapangan kerja utama dan besarnya pendapatan per bulan. Proporsi rumah tangga dengan pendapatan terendah (< Rp. 500.000,-) tetap konstan sekitar 25 persen dalam tiga tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009). Untuk kelompok pendapatan antara Rp 500.000,- - Rp 2.000.000,- terjadi penurunan proporsi sedangkan untuk kelompok pendapatan di atas 2 juta rupiah terjadi kenaikan proporsi dari 14 persen pada tahun 2006 menjadi hampir dua kali lipat (26 persen) pada tahun 2009. Ini juga seiring dengan kondisi pendapatan rumah tangga yang antara tahun 2006, 2008 dan 2009 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,2 persen (lihat Tabel 3.9). Keadaan ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan tingkat pendapatan rumah tangga untuk penduduk di Kelurahan Pundata Baji, meskipun keadaan ini tidak secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan pendapatan rumah tangga ini sangat dipengaruhi oleh harga produk yang dihasilkan rumah tangga. Untuk Kelurahan Pundata Baji produksi utama rumah tangga berasal dari sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap, yang merupakan mata pencaharian bagi sekitar 47 persen penduduk di kelurahan ini (Noveria dkk, 2008, 45). Kenaikan harga produksi ini tentunya juga seiring dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan konsumsi.

Tabel 3.11  
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-rata per Bulan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2006, 2008, dan 2009 (%)

Kelompok pendapatan (Rp.)	Jumlah (%)		
	2006	2008	2009
< 500.000	25,0	25,8	25,2
500.000 – 999.999	26,0	31,7	23,5
1.000.000 – 1.499.999	21,0	20,0	17,6
1.500.000 – 1.999.999	14,0	9,2	7,6
2.000.000 – 2.499.999	4,0	5,8	10,1
2.500.000 – 2.999.999	4,0	1,7	6,7
> 3.000.000	6,0	5,8	9,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	100	120	119

Sumber: Survei data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.  
Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

### *Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan*

Pada tahun 2006 sekitar 18 persen rumah tangga memiliki mata pencaharian di sektor perikanan tangkap (kegiatan kenelayanan). Tahun 2008, proporsi ini meningkat menjadi 25,8 persen dan tahun 2009 menurun menjadi 22,7 persen (dilihat dari mata pencaharian utama kepala rumah tangga, data hasil survei tahun 2006, 2008 dan 2009). Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan kenelayanan tidak merupakan mata pencaharian utama yang tetap, mungkin disebabkan karena bervariasi ketersediaan mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pundata Baji, dibandingkan, misalnya, dengan di Desa Mattiro Bombang.

Pola pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan ini juga agak berbeda dengan pola pendapatan rumah tangga pada umumnya. Selama kurun waktu 2006, 2008, dan 2009, pola pendapatan rata-rata rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji menunjukkan kenaikan yang konsisten. Sebaliknya, untuk kegiatan kenelayanan, antara tahun 2006-2008 terjadi penurunan, sedangkan antara tahun 2008-2009 terjadi kenaikan pendapatan. Meskipun demikian, secara umum, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan ini meningkat rata-rata 1,6 persen per tahun, sedangkan untuk pendapatan per kapita meningkat sebesar rata-rata 16,4 persen per tahun. Untuk pendapatan per kapita terjadi peningkatan yang konsisten selama periode 2006-2009 (Tabel 3.12). Ini mungkin disebabkan karena adanya perubahan jumlah anggota rumah tangga pada tahun-tahun tersebut.

Tabel 3.12  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenyelayanan di Kelurahan Pundata Baji,  
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009.

Statistik pendapatan	Besar pendapatan per bulan (Rp.)			Perubahan Pendapatan (%)			Perubahan per tahun, 2006-2009 (%)
	2006	2008	2009	2006-2008	2008-2009	2006-2009	
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	656.944	654.215	688.864	-0,42	5,30	4,86	1,59
Rata-rata pendapatan per kapita	115.302	151.762	181.889	31,62	19,85	57,75	16,41
Median	549.167	520.000	428.333	-	-	-	-
Minimum	191.667	60.666	160.000	-	-	-	-
Maksimum	1.533.333	2.000.000	3.666.667	-	-	-	-
N	18	107	27	-	-	-	-

Catatan: Kasus 'pencian' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Kontribusi pendapatan dari kegiatan kenelayanan dalam rumah tangga terhadap total pendapatan relatif cukup besar (lebih dari 50 persen), tetapi dari statistik rata-rata pendapatan rumah tangga terlihat proporsinya terus menurun antara tahun 2006-2009. Di satu sisi kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan kenelayanan menjadi semakin kurang penting dalam menopang kehidupan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji. Jika dilihat pendapatan maksimum dari kegiatan kenelayanan ini, proporsinya terhadap pendapatan rata-rata juga semakin meningkat. Keadaan ini juga seiring dengan meningkatnya pendapatan maksimum rata-rata kegiatan kenelayanan dari kurang lebih 1,5 juta rupiah pada tahun 2006, menjadi 2 juta rupiah pada tahun 2008 dan 3,7 juta rupiah pada tahun 2009 (Tabel 3.13). Ini menunjukkan bahwa kemungkinan, untuk kegiatan kenelayanan dengan modal besar, hasil tangkap menjadi bertambah baik, yang dapat disebabkan karena berbagai hal antara lain peningkatan sarana/prasarana melaut atau bahkan membaiknya kondisi ketersediaan SDL, karena pengaruh perubahan lingkungan (*environment*) SDL.

Tabel 3.13

Kontribusi Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008 dan 2009 (%).

Statistik pendapatan per bulan	Kontribusi pendapatan dari kegiatan kenelayanan terhadap pendapatan total rumah tangga		
	2006	2008	2009
Rata-rata pendapatan rumahtangga (mean)	59,2	56,0	50,4
Rata-rata pendapatan per kapita	56,0	64,1	63,7
Maksimum	32,0	24,8	60,8
N	18	31	27

Catatan: Kasus 'pencilan' maksimum sudah dikeluarkan.

Sumber: Survei data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.

Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Statistik pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan kenelayanan terhadap rata-rata pendapatan total per kapita meningkat. Keadaan ini juga dapat terkait dengan meningkatnya pendapatan maksimum dari kegiatan kenelayanan, di samping kemungkinan berkurangnya jumlah rumah penduduk yang mempunyai mata pencaharian pada kegiatan kenelayanan. Dengan demikian persaingan dalam eksploitasi SDL juga berkurang yang memungkinkan penduduk yang tetap terlibat dalam kegiatan ini dapat meningkatkan hasil tangkapannya.

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga sangat dipengaruhi oleh musim (gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah). Untuk penduduk di Kelurahan Pundata Baji yang terlibat dalam kegiatan kenelayanan, musim gelombang lemah merupakan musim terbaik dalam melaut sehingga memberikan penghasilan lebih besar dibandingkan dengan dua musim lainnya, dalam tiga tahun pengamatan (2006, 2008, dan 2009). Pendapatan terendah didapat ketika musim gelombang kuat, karena dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap frekuensi dan jarak untuk pergi melaut. Pada gelombang kuat juga lebih sering nelayan tidak mendapatkan penghasilan (pendapatan minimum rumah tangga 'nol' rupiah, pada tahun 2006 dan 2008). Kondisi terburuk untuk kegiatan kenelayanan terjadi pada tahun 2008, karena untuk setiap musim pada tahun tersebut ditemukan rumah tangga yang tidak mendapatkan penghasilan dari kegiatan kenelayanan. Selain dari itu, pendapatan maksimum dari kegiatan ini, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.14 juga ada kecenderungan meningkat. Hanya kondisi pada musim pancaroba yang menunjukkan fluktuasi. Pada umumnya tidak ditemukan pola pendapatan yang tetap dari kegiatan kenelayanan berdasarkan musim selama tiga tahun pengamatan. Ini dapat disebabkan karena kegiatan kenelayanan (perikanan tangkap) selain dipengaruhi oleh musim yang tetap (gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah) juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena alam lainnya yang tidak sulit diprediksi, serta kemampuan nelayan untuk membiayai kegiatan melaut. Untuk nelayan dengan kapasitas peralatan yang besar



dan lebih baik, kesempatan untuk melaut mungkin tidak begitu dipengaruhi kondisi alam.

Sebagian besar rumah tangga yang memiliki penghasilan dari kegiatan kenelayan pada musim gelombang kuat dan pancaroba berpendapatan di bawah Rp. 500.000,-. Keadaan ini ditemukan pada setiap tahun pengamatan (2006, 2008 dan 2009). Pada saat gelombang lemah, pendapatan dari kegiatan kenelayan membaik, dengan meningkatnya proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas 1 juta rupiah. Tingginya pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan pada musim gelombang lemah juga diiringi dengan distribusi pendapatan yang lebih bervariasi dibandingkan dua musim lainnya. Pada musim gelombang kuat, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan ini relatif kecil, dilihat dari konsentrasi pengelompokan rumahtangga pada kelompok pendapatan di bawah 1 juta rupiah, bahkan pada tahun 2006 di bawah 500 ribu rupiah. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, pada tahun 2008 dan 2009 persebaran rumahtangga menurut tingkat pendapatannya juga lebih menyebar pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi (Tabel 3.15). Keadaan ini juga mengindikasikan pendapatan dari kegiatan kenelayan yang menjadi lebih baik.

Tabel 3.14

Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenyelanaan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (Rp.)

Statistik pendapatan	Musim dan besar pendapatan (Rp.)									
	Gelombang kuat			Pancaroba			Gelombang lemah			
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2009
Rata-rata rumah tangga	135.000	591.000	490.333	457.222	792.900	540.296	1.378.611	1.072.600	1.531.630	
Median	75.000	355.000	250.000	500.000	675.000	390.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
Minimum rumah tangga	0	0	10.000	200.000	0	20.000	250.000	0	100.000	
Maksimum rumah tangga	500.000	1.750.000	3.000.000	9.550.000	1.600.000	2.000.000	4.000.000	3.500.000	10.000.000	

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Social-Ekonomi Coremap, 2008.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Social-Ekonomi Coremap, 2009.

Tabel 3.15  
 Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten  
 Pangkajene dan Kepulauan, 2006, 2008, dan 2009 (%).

Besar pendapatan	Musim dan besar pendapatan (Rp.)											
	Gelombang Kuat			Pancaroba			Gelombang lemah					
	2006	2008	2009	2006	2008	2009	2006	2008	2009			
< 500.000	94,4	58,8	71,4	44,4	30,0	60,7	16,7	16,0	25,0			
500.000 – 999.999	5,6	16,0	14,3	55,6	28,0	21,4	44,4	28,0	21,4			
1.000.000 – 1.499.999	-	22,0	3,6	-	22,0	7,1	5,6	38,0	28,6			
1.500.000 – 1.999.999	-	4,0	-	-	10,0	3,6	11,1	6,0	10,7			
2.000.000 – 2.499.999	-	-	3,6	-	-	3,6	5,6	6,0	3,6			
2.500.000 – 2.999.999	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-			
> 3.000.000	-	-	7,1	-	-	3,6	16,7	4,0	10,7			
Jumlah	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
N	18	31	28	18	31	28	18	31	28			

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2008.  
 Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.

Seperti di Desa Mattiro Bombang, Program Coremap yang diimplementasikan untuk wilayah pesisir di Kelurahan Pundata Baji juga memberikan bantuan berupa dana bergulir untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha ekonomi produktif (UEP). Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diindikasikan dari perbedaan pendapatan rumah tangga anggota dan bukan anggota pokmas UEP. Tabel 3.16 menunjukkan bahwa secara umum pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir memang relatif lebih tinggi dari rumah tangga bukan penerima dana bergulir, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar.

Dari median pendapatan rumah tangga terlihat bahwa pada tahun 2009 sebanyak 50 persen rumah tangga anggota penerima dana bergulir memiliki pendapatan di atas Rp.1.050.000,-, sedangkan untuk rumah tangga bukan penerima dana bergulir sekitar 50 persen berpendapatan di atas Rp. 1.000.000,-. Keadaan ini dapat menjadi indikasi keberhasilan dari program pemberian bantuan dana bergulir Coremap dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Untuk pendapatan maksimum, pendapatan tertinggi ternyata dimiliki oleh rumah tangga bukan penerima dana bergulir. Pendapatan maksimum ini dimiliki rumah tangga dimana kepala rumah tangganya mempunyai usaha perikanan budidaya. Pendapatan tertinggi untuk penerima dana bergulir ditemukan pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor perikanan tangkap (nelayan), sedangkan pendapatan minimum untuk penerima dana bergulir ditemukan pada rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan (lihat Tabel 3.9 dan 3.10).

Tabel 3.16  
 Statistik Pendapatan Rumah Tangga Penerima dan Non-Penerima  
 Dana Bergulir Coremap, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten  
 Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2009.

Statistik pendapatan	Pendapatan penerima dana bergulir (Rp,)	Pendapatan bukan penerima dana bergulir (Rp,)	Pendapatan total rumah tangga (Rp,)
Rata-rata pendapatan rumah tangga (mean)	1.431.806	1.348.045	1.367.753
Rata-rata pendapatan per kapita	321.629	274.608	285.672
Median	1.050.000	1.000.000	1.000.000
Minimum	130.000	71.667	71.667
Maksimun	3.800.000	6.033.333	6.033.333
N	28	91	119

Sumber: Survey Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi Coremap, 2009.



## BAB IV

### PENUTUP

**P**rogram rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (Coremap) di Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pelaksanaan Coremap di wilayah ini termasuk dalam kegiatan fase kedua, dari tiga fase yang direncanakan dalam program yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 1990-an tersebut. Seperti di berbagai lokasi Coremap lainnya, kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep mencakup berbagai aspek, tidak hanya dari sisi ekologi, khususnya penyelamatan kondisi (fisik) terumbu karang akan tetapi juga dari aspek ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, yang merupakan salah satu tujuan Coremap.

Agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan keterlibatan dari semua pihak, baik pengelola di berbagai tingkat (desa/kelurahan dan kabupaten) maupun masyarakat di lokasi Coremap. Keterlibatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang Coremap, mencakup tujuan/target yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta mekanisme pelaksanaannya. Pengetahuan yang memadai dapat mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan Coremap, apalagi jika kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Terkait dengan penyelenggaraan Coremap, penting pula diketahui pengetahuan masyarakat di lokasi program mengenai pengelolaan sumber daya laut. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Coremap.

#### 4.1. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN KEGIATAN COREMAP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di dua lokasi Coremap di Kabupaten Pangkep (Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan sumber daya laut. Hal ini termasuk pengetahuan mengenai penggunaan armada dan alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Pengetahuan tersebut kemudian diwujudkan dalam praktek pengelolaan sumber daya laut, khususnya untuk penangkapan berbagai biota laut sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang. Bagi penduduk Kelurahan Pundata Baji, praktek tersebut dilaksanakan oleh mereka yang tinggal di sepanjang pantai yang pada umumnya bekerja sebagai nelayan.

Kebanyakan nelayan di kedua lokasi menggunakan armada tangkap yang aman bagi lingkungan, yaitu perahu (*jolloro*) yang dilengkapi dengan motor. Selanjutnya, alat tangkap yang dominan digunakan adalah jaring, bubu, dan pancing, yang juga tidak membahayakan kondisi terumbu karang. Armada dan alat tangkap yang merusak, seperti *mini trawl* dan bom pada umumnya digunakan oleh nelayan yang berasal dari luar lokasi yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Masyarakat di kedua lokasi penelitian sangat menentang praktek-praktek yang dilakukan oleh nelayan dari luar tersebut. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengejaran dan pengusiran para pelaku pengrusakan.

Meskipun telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan sumber daya laut, masih ditemukan praktek-praktek eksploitasi yang menghambat kelangsungan hidup beberapa jenis biota laut. Praktek tersebut terutama penangkapan kepiting yang dilakukan sepanjang musim tanpa mempertimbangkan ukurannya. Masyarakat sesungguhnya mempunyai pengetahuan mengenai ukuran kepiting yang layak ditangkap, terutama untuk menjaga kelangsungan hidupnya,



namun permintaan kepiting yang tinggi untuk bahan baku usaha pengupasan kepiting (*mini plan*) menyebabkan mereka menangkap kepiting dalam semua ukuran. Hal ini karena *mini plan* menerima kepiting yang dipasok nelayan tanpa menentukan ukurannya, termasuk yang berukuran kecil. Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa kepentingan ekonomi mengalahkan upaya pengelolaan sumber daya laut yang lestari.

Jika pengetahuan masyarakat di kedua lokasi penelitian mengenai pengelolaan sumber daya laut tergolong cukup baik, pengetahuan mereka mengenai Coremap dan berbagai kegiatannya masih terbatas. Sebagian besar responden yang diwawancarai dalam penelitian ini mengetahui adanya kegiatan Coremap di tempat tinggal mereka, namun mereka tidak mengetahui secara mendalam mengenai tujuan, proses, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Hanya beberapa orang tertentu, khususnya yang terlibat sebagai pengurus LPSTK dan anggota pokmas kegiatan Coremap yang mengetahui kegiatan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut secara mendalam. Di Desa Mattiro Bombang bahkan ditemukan anggota pokmas yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan pokmasnya. Hal ini tidak mengherankan karena sosialisasi Coremap tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain karena luasnya cakupan wilayah desa/kelurahan lokasi program tersebut disertai kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau kecil.

Keterbatasan pengetahuan tentang Coremap dapat pula dilihat dari sedikitnya masyarakat di kedua lokasi penelitian yang mengetahui adanya kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut. Di Desa Mattiro Bombang, umpamanya, tidak banyak anggota masyarakat yang mengetahui kegiatan pembuatan rumpon yang didanai dari *village grant*. Kegiatan tersebut hanya diketahui oleh mereka yang terlibat langsung, yaitu pengurus LPSTK dan anggota pokmas produksi Coremap. Karena tidak mengetahui keberadaan rumpon, banyak nelayan di desa ini yang tidak memanfaatkannya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika

sebagian besar penduduk Desa Mattiro Bombang mengatakan bahwa mereka tidak mendapat manfaat dari kegiatan pembangunan fisik desa yang didanai oleh Coremap.

Keadaan yang sama juga ditemui dalam kegiatan penyaluran bantuan dana bergulir (*seed fund*). Di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang penduduk yang mengetahui adanya dana tersebut cenderung terbatas pada mereka yang tinggal di sekitar *Info Center*. Sementara itu, sebagian besar penduduk yang tinggal jauh dari “kantor” Coremap tersebut tidak mengetahui kegiatan pemberian dana bergulir bagi masyarakat yang tinggal di lokasi Coremap. Sampai pertengahan tahun 2009 jumlah penerima bantuan *seed fund* di Desa Mattiro Bombang baru sekitar 70 orang<sup>11</sup>. Sungguhpun demikian, jumlah ini meningkat dibanding waktu awal *seed fund* digulirkan, yaitu hanya sekitar 50 orang yang merupakan anggota pokmas Coremap. Sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan dana bergulir dapat dimaklumi karena kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2008 dengan jumlah dana bergulir sebesar Rp. 50.000.000,-. Sampai saat penelitian tahun 2009 dilaksanakan tidak ada tambahan dana untuk digunakan sebagai *seed fund*, sehingga dana yang digulirkan saat ini adalah yang diterima pada tahun 2008 ditambah dengan “bunga” pinjaman yang dibayar oleh penerima bantuan.

Kondisi yang ditemukan di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih baik dibanding di Desa Mattiro Bombang, meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok. Karena di Kelurahan Pundata Baji dana pembangunan fisik kelurahan (*village grant*) dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar pantai, seperti sarana MCK dan bak penampungan air, maka lebih banyak masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan pembangunan yang

---

<sup>11</sup> Pada umumnya masing-masing penerima bantuan berasal dari rumah tangga yang berbeda. Jika penerima bantuan sebanyak 70 orang, maka diasumsikan jumlah rumah tangga yang telah mendapat bantuan dana bergulir dari Coremap sebanyak 70 unit.

didanai Coremap. Sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas pada pengurus LPSTK dan anggota pokmas Coremap. Dengan demikian, dapat dimaklumi jika lebih banyak penduduk Kelurahan Pundata Baji yang mengatakan bahwa mereka merasakan manfaat dari kegiatan Coremap yang telah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut.

#### **4.2. PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SDL**

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan Coremap adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Manfaat dan fungsi terumbu karang, upaya melestarikannya, serta kerugian (ekologis dan ekonomis) yang ditimbulkan akibat kerusakan terumbu karang merupakan sebagian dari materi pengetahuan yang disampaikan kepada masyarakat. Pemberian pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga terumbu karang dari aktifitas-aktifitas yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya laut tersebut.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Coremap di Desa Mattiro Bombang dan di Kelurahan Pundata Baji memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Hal ini antara lain terlihat dari makin kuatnya kesadaran dan keinginan untuk memelihara kondisi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Kesadaran tersebut juga diwujudkan dalam berbagai perilaku yang sebelumnya tidak dipraktekkan. Sebelum pelaksanaan Coremap kesadaran terhadap pengelolaan dan pelestarian terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya lebih sering diwujudkan dengan penggunaan armada dan alat tangkap yang tidak merusak. Setelah beberapa waktu Coremap dilaksanakan, pencegahan pengrusakan terumbu karang juga dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas pihak lain, khususnya nelayan dari luar daerah yang mengancam kehidupan sumber daya laut yang

merupakan tempat hidup dan berkembangbiaknya berbagai jenis biota laut tersebut.

Pengawasan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah melalui kegiatan patroli yang secara khusus dilaksanakan oleh pokmas pengawasan Coremap. Anggota masyarakat yang lain juga terlibat dalam kegiatan tersebut, meskipun tidak dilakukan secara khusus sebagaimana kegiatan pokmas pengawasan. Nelayan pada umumnya melakukan kegiatan patroli bersamaan dengan kegiatan mencari ikan. Mereka berusaha mengusir nelayan-nelayan dari luar yang melakukan kegiatan pengrusakan di wilayah perairan sekitar desa/kelurahan mereka. Namun sayangnya, kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terutama karena kecepatan armada yang digunakan oleh nelayan setempat tidak dapat mengimbangi armada nelayan luar pelaku pengrusakan. Dalam kasus ini mereka hanya dapat melaporkan kejadian yang ditemui kepada anggota pokmas pengawasan Coremap untuk seterusnya ditindaklanjuti.

Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan bahwa semakin banyak nelayan yang melakukan kegiatan pengawasan "sukarela" tersebut. Besar kemungkinan hal tersebut terjadi karena makin baiknya pengetahuan mereka mengenai manfaat terumbu karang bagi kelestarian ekologi serta kehidupan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan.

Perubahan perilaku yang juga dapat dicermati setelah pelaksanaan Coremap adalah yang terkait dengan pemanfaatan areal penangkapan ikan dan berbagai biota lainnya. Sekitar 2-3 tahun terakhir ada kecenderungan sebagian besar nelayan hanya melakukan penangkapan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah penangkapan (*catchment area*). Sebaliknya, lokasi yang disepakati sebagai daerah perlindungan laut (DPL) dijaga dan "disterilkan" dari kegiatan penangkapan. Sebelum Coremap dilaksanakan penangkapan dilakukan di semua wilayah, tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap daerah-daerah tertentu di wilayah perairan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kelurahan Pundata Baji menetapkan areal di

pinggir pantai sebagai daerah perlindungan dan dikenal sebagai daerah perlindungan mangrove (DPM).

Terlepas dari perubahan perilaku di atas, beberapa praktek pengelolaan sumber daya laut tidak mengalami perubahan, meskipun kegiatan Coremap telah berlangsung sekitar lima tahun. Praktek tersebut adalah penangkapan kepiting yang tidak mempertimbangkan ukurannya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sepanjang permintaan masih tinggi, terutama dari *mini plan* yang terletak di kedua lokasi penelitian, sulit mengurangi penangkapan yang berlebihan terhadap sumber daya laut yang bernilai ekspor tinggi tersebut. Menanggapi keadaan ini, maka di masa mendatang perlu dilakukan sosialisasi dengan penekanan pada pengurangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, termasuk kepiting dan jenis-jenis biota lainnya yang bernilai jual tinggi.

#### 4.3. MANFAAT SOSIAL EKONOMI

Coremap dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan pesisir, di samping manfaat ekologi, yaitu terpelihara dan meningkatnya kondisi terumbu karang di lokasi program tersebut. Salah satu indikator untuk melihat manfaat ekonomi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Coremap adalah peningkatan penghasilan rata-rata masyarakat di lokasi program sebesar 2 persen per tahun, atau 10 persen setelah program dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun. Peningkatan pendapatan diasumsikan dapat mengurangi angka kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, yang juga menjadi salah satu tujuan Coremap.

Hasil penelitian yang dilakukan selama tiga titik waktu, yaitu tahun 2006 (T0), 2008 (T1), dan 2009 (T2) memperlihatkan tren peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga sampel setiap bulan. Di Desa Mattiro Bombang pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat sebesar 11,2 persen per tahun sepanjang periode 2006-2009. Namun peningkatan yang terjadi tidak terus menerus sepanjang tiga tahun tersebut karena

setelah meningkat pada tahun 2006-2008 pendapatan rata-rata rumah tangga sampel mengalami penurunan selama tahun 2008-2009. Karena persentase peningkatan jauh lebih besar dari persentase penurunan, maka secara umum pendapatan rata-rata rumah tangga sampel meningkat selama tiga tahun penelitian. Pola yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita rumah tangga per bulan yang selama tahun 2006-2009 mengalami peningkatan sebesar 13,3 persen setiap tahun.

Data menunjukkan bahwa di Desa Mattiro Bombang kegiatan kenelayanan yang mencakup perikanan tangkap memberikan pendapatan maksimum terbesar dalam tiga (3) tahun pengamatan. Kontribusi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan juga cukup besar dan umumnya memperlihatkan proporsi yang terus meningkat antara tahun 2006-2009. Namun demikian, proporsi rumah tangga yang mempunyai mata pencaharian utama dari kegiatan ini mengalami penurunan. Kondisi ini dapat menunjukkan berkurangnya persaingan rumah tangga dalam mengeksploitasi sumberdaya laut (SDL), sehingga memperbesar kemungkinan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya dari kegiatan kenelayanan. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat menjadi indikasi terjadinya diversifikasi mata pencaharian penduduk di Desa Mattiro Bombang, dengan bertambahnya proporsi rumah tangga yang bermatapencaharian utama di luar kegiatan kenelayanan. Hal ini kemungkinan merupakan dampak dari kegiatan mata pencaharian alternatif yang dikembangkan Coremap, sehingga penduduk di lokasi program dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak bersumber dari laut. Dengan demikian, ketergantungan terhadap sumber daya laut dalam memperoleh pendapatan dapat pula dikurangi. Dampak selanjutnya adalah terjadinya perubahan pada pola pendapatan yang biasanya sangat tergantung pada kondisi musim/cuaca sepanjang tahun.

Sama halnya dengan pendapatan rata-rata secara keseluruhan, pendapatan rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga mengalami peningkatan selama periode 2006-2009. Peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan dari kegiatan kenelayanan

selama kurun waktu tiga tahun tersebut sebesar 17,9 persen setiap tahun. Selanjutnya, pendapatan per kapita rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen per tahun selama periode waktu yang sama.

Program Coremap melalui bantuan dana bergulir kepada masyarakat merupakan salah satu intervensi yang kemungkinan berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara umum pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir lebih besar dibanding pendapatan rumah tangga bukan penerima dana bergulir. Dari median pendapatan rumah tangga terlihat bahwa pada tahun 2009 sekitar 50 persen rumah tangga anggota pokmas memiliki pendapatan di atas Rp. 733.333,-, sedangkan untuk rumah tangga bukan anggota pokmas sebanyak 50 persen berpendapatan di atas Rp. 600.000,-.

Pola peningkatan pendapatan yang terjadi di Desa Mattiro Bombang juga dialami oleh rumah tangga sampel di Kelurahan Pundata Baji, daerah yang terletak di wilayah pesisir pantai barat Pulau Sulawesi, meskipun dengan persentase yang lebih kecil. Pendapatan rumah tangga setiap bulan di kelurahan Pundata Baji meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 7,2 persen per tahun antara tahun 2006-2009, sedangkan pendapatan per kapita per bulan lebih besar peningkatannya, yaitu sebesar 11,5 persen setiap tahun. Sejalan dengan rata-rata pendapatan secara keseluruhan, pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan dari kegiatan kenelayanan juga mengalami peningkatan, akan tetapi dengan laju peningkatan yang lebih rendah, yaitu sebesar 1,6 persen setiap tahun. Untuk pendapatan per kapita rumah tangga sampel per bulan, peningkatan yang terjadi jauh lebih lebih besar, yaitu 16,4 persen setiap tahun selama 2006-2009.

Berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang, kegiatan kenelayanan bukanlah pemberi pendapatan rumah tangga terbesar di Kelurahan Pundata Baji. Di kelurahan ini 4 (empat) sektor mata pencaharian terpenting untuk penduduk adalah industri, jasa kemasyarakatan, perdagangan dan perikanan budidaya (khususnya udang dan ikan

bandeng). Selain dari itu, penduduk di Kelurahan Pundata Baji juga ada yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Berlawanan dengan kondisi di Desa Mattiro Bombang, antara tahun 2006-2008 terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan tangkap, dari 18 persen pada tahun 2006 menjadi 25,8 persen pada tahun 2008. Namun demikian, untuk tahun 2009 proporsinya menurun kembali menjadi 22,7 persen.

Kontribusi pendapatan dari kegiatan kenelayanan dalam rumah tangga, terhadap total pendapatan rumah tangga relatif cukup besar (lebih dari 50 persen), tetapi dari statistik rata-rata pendapatan rumah tangga terlihat proporsinya terus menurun antara tahun 2006-2009. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan kenelayanan tidak merupakan mata pencaharian utama yang tetap. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bervariasinya ketersediaan mata pencaharian di Kelurahan Pundata Baji. Selain dari itu, untuk masyarakat pesisir kegiatan di bidang perikanan budidaya lebih memungkinkan, karena kondisi alam dan daerah pesisir sangat mendukung untuk usaha tersebut, dibandingkan dengan nelayan tangkap yang dipengaruhi oleh kondisi iklim dan musim. Hal ini didukung oleh data yang memperlihatkan lebih tingginya pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan budidaya dibandingkan dengan perikanan tangkap.

Seperti di Desa Mattiro Bombang, Program Coremap yang diimplementasikan di wilayah pesisir di Kelurahan Pundata Baji juga memberikan bantuan berupa dana bergulir untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha ekonomi produktif (UEP). Keberhasilan dari kegiatan ini dapat terlihat dari perbedaan pendapatan rumah tangga anggota dan bukan anggota pokmas UEP. Secara umum, pendapatan rumah tangga penerima dana bergulir memang relatif lebih tinggi daripada rumah tangga bukan penerima dana bergulir, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Dari median pendapatan rumah tangga terlihat bahwa pada tahun 2009 sekitar 50 persen rumah tangga penerima dana bergulir memiliki pendapatan di atas Rp.1.050.000,-,



sedangkan untuk rumah tangga bukan penerima dana bergulir, sebanyak 50 persen berpendapatan di atas Rp. 1.000.000,-.

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini serta perbedaan pendapatan antara rumah tangga anggota pokmas dan bukan anggota pokmas Coremap seperti yang dikemukakan di atas perlu diinterpretasi secara hati-hati. Kondisi tersebut tidak dapat serta merta dikatakan sebagai keberhasilan Coremap dari sisi ekonomi. Kedua daerah penelitian juga menjadi lokasi pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, di samping kegiatan ekonomi Coremap. Program-program tersebut memberikan bantuan untuk usaha ekonomi kepada masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan dana bergulir seperti KUB (Koperasi Usaha Bersama) dan Koperasi Syariah yang merupakan program dari sektor koperasi serta PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Meskipun pengelola masing-masing program mempunyai kesepakatan bahwa satu (anggota) rumah tangga di desa/kelurahan hanya boleh memperoleh bantuan dari satu program, dalam kenyataannya terdapat beberapa rumah tangga yang memperoleh pinjaman dari lebih dari satu program. Sebagai contoh, satu rumah tangga yang memperoleh dana *seed fund* juga mendapatkan pinjaman dana bergulir dari kegiatan SPP (simpan pinjam perempuan) PNPM Mandiri.

Penghitungan pendapatan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan seluruh penghasilan yang diperoleh rumah tangga. Penghasilan tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi yang kemungkinan salah satu (atau lebih) di antaranya memperoleh bantuan modal dari berbagai program untuk peningkatan kondisi ekonomi. Dengan mempertimbangkan kenyataan dimana beberapa rumah tangga juga memperoleh bantuan dari program selain Coremap, maka sulit untuk mengatakan bahwa kenaikan pendapatan hanya merupakan kontribusi Coremap. Selain itu, faktor-faktor lain kemungkinan juga berperan dalam peningkatan penghasilan, seperti kenaikan harga komoditas yang diproduksi/ditangkap nelayan serta adanya sumber penghasilan lain

yang dimiliki oleh rumah tangga. Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya anggota rumah tangga yang bekerja, misalnya anak yang sebelumnya masih sekolah kemudian terjun ke dunia kerja. Hal ini memungkinkan rumah tangga memperoleh penghasilan lebih besar dari sebelumnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dikatakan bahwa Coremap berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangga, meskipun bukan faktor satu-satunya yang berpengaruh. Peran program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya juga tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat di kedua desa/kelurahan yang menjadi lokasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) 2009. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Coremap II & Eco-Natural Society Kabupaten Pangkep. 2006. *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi COREMAP II Kabupaten Pangkep*, Pangkajene.
- DIBI. 2009. *Kajian Ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III-2009*. 5-11-2009.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007. *Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II)*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info\\_Publik/Ekonomi\\_Regional/KER/Suls/ker\\_sulsel\\_tw309.htm](http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/KER/Suls/ker_sulsel_tw309.htm). diakses 20 Januari 2010.
- [http://www.coremap.or.id/tentang\\_coremap/mengenal\\_coremap.Mengenal\\_Coremap](http://www.coremap.or.id/tentang_coremap/mengenal_coremap.Mengenal_Coremap). diakses 17 Desember 2009.
- [http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=68&Itemid=41](http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=41). *Terumbu Karang Indonesia*. diakses 17 Desember 2009.
- Ishak. 2010. *Tahun 2009 Makassar Inflasi 0,49 Persen*. Indonesian Update, 04 Januari 2010. [http://www.indotim-news.com/isi\\_berita.php?&id=5911](http://www.indotim-news.com/isi_berita.php?&id=5911). 20/01/2010.
- Manuputty, Anna, dkk. 2007. *Monitoring Ekologi Pangkep*. CRITC-COREMAP II-LIPI. Jakarta.
- Noveria, Mita & Aswatini, 2007. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II. Kelurahan Karas. Kota Batam*. Jakarta: CRITC-LIPI.

- Noveria, Mita, Aswatini, Dewi Harfina dan Meirina Ayumi Malamassan. 2008. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil BME*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Noveria, Mita, Aswatini, Dewi Harfina dan Alvini Pranoto. 2008a. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II. Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Jakarta: LIPI Press.
- PMO/NCU Coremap II, tanpa tahun. *COREMAP II*. Directorate General of Marine, Coasts and Small Islands.
- Romdiati, Haning & Noveria, Mita. 2007. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II Kelurahan Pulau Abang Kota Batam. Hasil BME*. Laporan Penelitian CRITC LIPI.
- World Bank, 2004. *Project Appraisal Document*.

